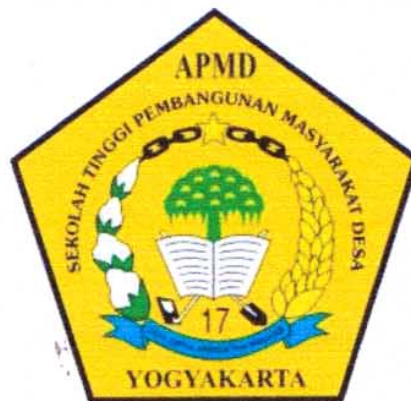


SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DESA WISATA***

(Studi di Desa Wisata Pulesari Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)



Disusun oleh:

ISAK PITHERSON A. WENY

17520132

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024



HALAMAN JUDUL

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DESA
WISATA**

(Studi di Desa Wisata Pulesari Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Agustus 2024

Waktu : 11.00 WIB

Tempat: Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

Analius Giawa, S.I.P., M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Penguji Samping I

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A
Penguji Samping II

Tanda Tangan

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isak Pitherson A. Weny

NIM : 17520132

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata”, adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Semua-sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2024

Penulis



Isak Pitherson A. Weny
17520132

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ungkapan syukur dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan dalam menjalani masa proses studi.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Nicodemus A. Weny dan Mama Josefina Pating.
Kepada saudara saya, kakak Danha, kakak Aty, kakak Lola, kaka Nela, kaka dan saudara kembar saya Ima. Terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, dukungan, kasih sayang dan kesabaran kalian sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana ini dengan baik.
3. Teman terkasih Cornelia Baunsele, terimakasih atas support dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini, sukses terus Dimana pun berada, Tuhan Menyertai Selalu.

Sekali lagi terimakasih atas doa, nasihat, serta pengalaman yang diberikan dan sangat berarti selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai perjalanan hidup kita yang dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

MOTTO

“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?”

(1 Korintus 3: 16)

“Keep Going On”

(Pitt)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4: 13)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat yang diberikan sehingga penulisan skripsi dengan judul “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata*” dapat terselesaikan dengan baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Analius Giawa S.IP.,MSi. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, serta gagasan yang mendukung selesainya skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat sebagai dosen penguji sampung 1 (satu), terimakasih atas kritik serta saran yang telah diberikan.
6. dan Ibu Dr. Rumsari Sumarto, S.I.P, M.P.A penguji sampung 2 (dua), terimakasih atas kritik dan saran dalam skripsi yang telah ditulis.
7. Bapak, Ibu Dosen dan semua civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada saya selama menuntut ilmu di kampus ini.
8. Pemerintah Kalurahan Wonokerto, Masyarakat Pulesari, dan Pengelola Desa Wisata Pulesari sebagai tempat penelitian skripsi yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman pengurus dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Protestan Filadelfia Tahun 2017-2018 dan 2018-2019, terimakasih atas dinamika organisasi yang diberikan selama masa kepengurusan.
10. Teman-teman seperjuangan dalam proses studi di STPMD “APMD” Yogyakarta Angkatan 2017 dimanapun kalian berada, salam sehat selalu untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 3 Agustus 2024
Penulis

Isak Pitherson A. Weny
17520132

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Literatur Review.....	6
G. Kerangka Konseptual	12
1. Collaborative Governance	12
2. Pengelolaan	20

3. Desa Wisata	24
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3. Obyek Penelitian	28
4. Subyek Penelitian	28
5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
6. Teknik Analisis Data.....	32
BAB II PROFIL KALURAHAN WONOKERTO DAN DESA WISATA PULESARI.....	34
A. Profil Kalurahan Wonokerto	34
1. Sejarah Kalurahan Wonokerto	34
2. Kondisi Geografis Kalurahan Wonokerto	34
3. Kondisi Demografi Kalurahan Wonokerto.....	36
4. Kondisi Sosial Ekonomi Kalurahan Wonokerto.....	40
5. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Wonokerto.....	43
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Wonokerto.....	47
B. Profil Desa Wisata Pulesari	50
1. Sejarah Desa Wisata Pulesari	50
2. Letak Administratif, Demografi dan Geografi	52
3. Logo dan Arti Desa Wisata.....	53
4. Struktur Lembaga/Organisasi.....	54
5. Visi dan Misi	56
6. Potensi Desa Wisata	56
BAB III PEMBAHASAN <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA PULESARI.....	64
A. Perencanaan Desa Wisata Pulesari.....	64
B. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari	69
C. Penggerakan Desa Wisata Pulesari	72

D. Pengawasan Desa Wisata Pulesari	78
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Deskripsi Infroman.....	29
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Bersasarkan Jenis Pekerjaan.....	39
Tabel 2. 2 Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan Wonokerto	41
Tabel 2. 3 Kondisi jaringan jalan Kalurahan Wonokerto	44
Tabel 2. 4 Jumlah sebaran fasilitas pendidikan.....	45
Tabel 2. 5 Jumlah sebaran fasilitas perekonomian	45
Tabel 2. 6 Jumlah sebaran Pemerintahan dan Pelayanan Umum.....	46
Tabel 2. 7 Daftar nama anggota BPD Kalurahan Wonokerto	49
Tabel 2. 8 Penggunaan lahan Dusun Pulesari	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Model Collaborative Governance Ansel & Gash.....	16
Gambar 1. 2 Alur Analisis Data	32
Gambar 2. 1 Jumlah Penggunaan Lahan.....	35
Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto	48
Gambar 2. 5 Logo Desa Wisata Pulesari.....	53
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Pengelola Desa Wisata Pulesari	55
Gambar 2. 7 Goa Sejarah	57
Gambar 2. 8 Tracking Sungai.....	57
Gambar 2. 9 Wisata Kebun Salak	58
Gambar 2. 10 Perikanan.....	59
Gambar 2. 11 Kesenian Kubro Siswo	59
Gambar 2. 12 Kesenian Tari Salak.....	59
Gambar 2. 13 Prajurit/Bregodo	60
Gambar 2. 14 Upacara Adat Pagar Bumi	60
Gambar 2. 15 Kerajinan Desa	61
Gambar 2. 16 Wisata Kuliner.....	61
Gambar 2. 17 Homestay.....	62

INTISARI

Penelitian ini mengkaji collaborative governance dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari di Kalurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor pariwisata, khususnya desa wisata, menjadi fokus pengembangan ekonomi di Yogyakarta. Desa Wisata Pulesari, yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, bertujuan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan alam setempat. Penelitian ini relevan karena mengkaji bagaimana collaborative governance dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata, yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Wisata Pulesari, Kalurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian pada kajian ini adalah kolaborasi Pemerintah Kalurahan, pengelola, dan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari.

Hasil pada penelitian ini adalah *Collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari sudah terbentuk, namun belum berjalan secara maksimal. Inisiatif dan pengelolaan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat, sementara peran pemerintah Kalurahan cenderung terbatas pada fungsi pengawasan dan fasilitasi. Meskipun demikian, model pengelolaan ini telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Kalurahan. Untuk meningkatkan efektivitas collaborative governance, diperlukan peran yang lebih aktif dari pemerintah Kalurahan dalam semua tahapan pengelolaan.

Kata kunci: collaborative governance, Pengelolaan, desa wisata Pulesari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor yang saat ini sedang serius diperhatikan dan dikembangkan oleh negara-negara di dunia dalam mendorong perekonomian sosial. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu, tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Masyarakat di sekitar objek-objek wisata pun dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi, misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi dan informasi), warung, dan lain sebagainya. Kegiatan- kegiatan ini pun dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekan angka pengangguran. Salah satu daerah pariwisata yang banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam Harianjogja.com, angka kunjungan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang bulan januari sampai juni 2024 menyentuh 5 juta wisatawan yang didominasi wisatan domestik dan wisatawan mancanegara mencapai 150.000 orang.

Daerah Istemewa Yogyakarta memiliki pilihan akomodasi wisata yang cukup beragam salah satu pilihan yang cukup mendapatkan antusias dari wisatawan adalah destinasi desa wisata. Desa wisata atau dalam konteks wisata pedesaan merupakan aset kepariwisaan yang berbasis pada potensi pedesaan

dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik wisatawan ke lokasi tersebut.

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa tipologi desa wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya, dan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu desa wisata berbasis keunikan daya tarik wisata utamanya, desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utamanya (pegunungan, sungai, agrowisata, pantai dan lain-lain), desa wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatifnya (kesenian ataupun kerajinan) sebagai daya tarik utamanya, dan desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama. Salah satu kabupaten yang berada di Yogyakarta dengan peminat wisata ke daerah desa wisata yang cukup banyak diminati yaitu Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang berada di Yogyakarta, dengan potensi kekayaan alam yang indah untuk mendukung pengembangan dan pembangunan kepariwisataan.

Dalam pengembangan desa berbasis desa wisata, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan desa wisata seperti adanya kesadaran dan kemauan dari masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata. Selain itu banyaknya potensi yang ada di daerah tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Dukungan dan bantuan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan provinsi pun sangat berperan terhadap proses pengembangan desa wisata.

Desa-desanya dengan potensi pariwisata kini sering disebut sebagai "desa wisata" karena adanya pengelolaan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Namun, penting untuk membedakan antara desa yang benar-benar menjadi destinasi wisata terpadu, dengan desa yang hanya memiliki beberapa aktivitas wisata. Perbedaan ini perlu diperjelas sebelum menganalisis lebih lanjut fenomena seperti yang terjadi di Desa Wisata Pulesari. Konsep desa wisata diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat, di mana masyarakat desa berperan sebagai pelaku utama dalam mengoptimalkan potensi wisata yang ada di daerah mereka..

Latar belakang terbentuknya Desa Wisata Pulesari ini yaitu berawal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat berdasar semangat gotong royong untuk membangun sebuah desa wisata. Desa Wisata Pulesari bertujuan untuk memberdayakan SDM dan SDA yang ada, agar eksistensinya dapat dilihat oleh masyarakat luas. Sebelum menjadi desa wisata pun tingkat pengangguran serta ekonomi di desa tersebut masih tinggi. Dengan dibentuknya menjadi desa wisata tentu akan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta ekonomi di Desa Wisata Pulesari. Masyarakat di Desa Wonokerto sangat berperan pada pembangunan.

Penelitian ini akan menggunakan sudut pandang tata kelola (*governance*) untuk menganalisis kerja sama dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari, hubungan antara pemerintah desa, pengelola Desa Wisata Pulesari dan masyarakat. Fenomena ini merupakan contoh nyata dari konsep tata kelola, yang melibatkan interaksi antara pemerintah, bisnis, dan warga. Konsep tata

kelola ini menggambarkan pergeseran dari model kekuasaan terpusat ke model yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.

Dalam melihat kolaborasi yang terjadi di pengelolaan Desa Wisata Pulesari akan dilihat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yakni *planing* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).

Studi ini patut dilakukan karena berfokus pada dinamika tata kelola kolaboratif dalam manajemen Desa Wisata Pulesari. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana setiap pemangku kepentingan berkontribusi dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Lokasi penelitian berada di Kalurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menganalisis peran masing-masing aktor yang terlibat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik collaborative governance di tingkat desa.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari.?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi cakupan penelitian dan membantu memilah data yang relevan dari keseluruhan data yang dikumpulkan di lapangan. Hal ini penting dilakukan karena biasanya penelitian menghasilkan banyak data, sehingga fokus penelitian berguna untuk memfokuskan penelitian dan mengidentifikasi data yang paling relevan. Oleh karena itu, penelitian menentukan fokus penelitian ini adalah mengkaji kolaborasi antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulesari dengan prinsip POAC yakni:

- a. *Planning*/ Perencanaan Desa Wisata Pulesari
- b. *Organize*/ Pengorganisasian Desa Wisata Pulesari
- c. *Actuating*/ Penggerakan Desa Wisata Pulesari
- d. *Controlling*/ Pengawasan Desa Wisata Pulesari

D. Tujuan Penelitian

1. Dari segi akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan baru tentang praktik tata kelola kolaboratif dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Pulesari. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi

referensi berharga bagi para peneliti yang mengkaji topik serupa di masa mendatang.

2. Dalam aspek praktis, studi ini ditargetkan untuk menghasilkan temuan konkret mengenai implementasi tata kelola kolaboratif di Desa Wisata Pulesari. Data dan analisis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Kalurahan Pulesari dalam upaya pengembangan dan pengelolaan desa wisata mereka.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti lain yang sejenis untuk mengembangkan konsep yang relevan dari aspek yang belum diteliti dari penelitian tentang desa wisata.
2. Secara praktis, diharapkan manfaat penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Kalurahan Pulesari tentang kolaborasi pengelolaan desa wisata. Khususnya Pemerintah Kalurahan Pulesari dalam pengelolaan desa wisata Pulesari di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Literatur Review

Bagian tinjauan pustaka dalam penelitian ini menyajikan analisis kritis terhadap studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan konsep tata kelola kolaboratif dalam konteks manajemen desa wisata. Tinjauan ini bertujuan untuk menempatkan penelitian saat ini dalam konteks pengetahuan yang sudah

ada, mengidentifikasi celah penelitian, dan memberikan dasar teoritis untuk studi yang dilakukan.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Novia Elisa (2020), fokus pada kajian ini adalah Collaborative Governance dalam pengelolaan objek wisata air terjun Ceuraceu di Desa Alue Jang Kecamatan Pasir Raya Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Stakeholder* yang berpersan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga, Bank Aceh, Kepala Desa Alue Jang, Kelompok Sadar Wisata, dan Masyarakat sekitar. Pada proses *collaboration* yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya kerja sama yang dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata yakni dengan melibatkan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat. Namun dalam prosesnya mengalami hambatan karena SDM dalam pengembangan wisata masih terbatas.

Dalam penelitian yang dilakukan Novia Elisa (2020) menambah aspek kajian dalam penelitian yang hendak dilakukan.

2. Penelitian Collaborative Governance dalam pengelolaan desa wisata pelang Kabupaten Tuban. Studi ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban menerapkan strategi tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata. Hal ini tercermin dari pola kemitraan dan koordinasi yang dibangun antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat setempat. Setiap pihak yang terlibat memberikan sumbangsih sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Upaya pemberdayaan masyarakat diperkuat dengan

pembentukan kelompok sadar wisata di tiap desa wisata. Penerapan model tata kelola kolaboratif oleh Pemerintah Kabupaten Tuban bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan desa wisata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan kolaboratif desa wisata Pelang Kabupaten Tuban, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Pelang berjalan secara efektif, melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pariwisata, Bank Jatim, dan Kelompok Sadar Wisata. Aspek-aspek penting dalam dinamika kolaborasi, termasuk komunikasi, pemanfaatan sumber daya, dan pemeliharaan kepercayaan antar pihak, telah terlaksana dengan baik dan efisien.
- b. Upaya-upaya kolaboratif dalam mengelola Desa Wisata Pelang telah dimaksimalkan. Ini mencakup penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan untuk meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang berkolaborasi. Selain itu, semua pihak yang terlibat telah menunjukkan keterbukaan dalam berbagi informasi, yang berkontribusi pada kemajuan proses kolaborasi.
- c. Kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Pelang telah menghasilkan dampak sosial yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata dan terbukanya peluang ekonomi

baru bagi penduduk setempat. Dampak ini dinilai signifikan, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan sektor pariwisata di Desa Pelang. Kajian tersebut menambah aspek kajian dalam penelitian yang akan dilakukan.

3. Penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan dan Pengembangan di Desa Ngargogondo, Kecamatan Bobudur, Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian adalah, Desa Ngargogondo memiliki networked structure stakeholder yang tidak terorganisir (*self governance*) dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Mereka adalah Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pemerintah Desa Ngargogondo, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan Masyarakat. Masing-masing stakeholder telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Satu hal yang disayangkan bahwa *networked structure* yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita –cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau hilangnya lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelas jika suatu saat dibentuk networked structure yang lebih terorganisir (*network administrative organization*). Padahal berdirinya desa wisata merupakan kondisi yang diimpikan oleh masyarakat Desa Ngargogondo agar tidak merasa tertinggal dengan desa –desa tetangga yang telah lebih dahulu berdiri menjadi desa wisata. Kondisi networked structure yang belum

terkoordinir diikuti dengan tidak optimalnya dimensi collaborative governance lainnya, sehingga hal ini menjadi kendala bagi percepatan pembentukan desa wisata di Ngargogondo. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu untuk mewujudkan network administrative organization diperlukan adanya musyawarah stakeholder guna membahas uraian kerja masing –masing stakeholder dan pembagian lahan bisnis wisata. Selanjutnya perlu dibentuk forum komunikasi yang terarah menuju pengembangan desa wisata.

4. Penelitian Mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Andi Nur (2019). Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:
1. *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah (Bank Sampah Pusat) menunjukkan 3 indikator yaitu: 1) *Trus among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan) masih minim, walaupun pihak pemerintah dan swasta saling percaya satu sama lain, lain halnya dengan masyarakat ke pemerintah itu sendiri, masyarakat enggan terlalu percaya dengan adanya program pemerintah yang dilaksanakan. 2) *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas) program yang dilakukan pemerintah dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2011. 3) *Information sharing* (berbagi informasi) antara stakeholder tidak berjalan dengan baik. Dari ketiga indikator ini, satu

indikator berjalan dengan baik yaitu *distributive accountability* (pembagian akuntabilitas) karena berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, namun belum cukup untuk membuat kolaborasi lebih efektif, karena hanya sebagian dari stakeholder yang mengubah pola pikirnya. Ditemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan komunikasi yang terjalin masih kurang dengan adanya keterlambatan informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

5. Penelitian mengenai *Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban Kecamatan Ratotok, Nadia Tongkotow dan Welly Waworundeng (2021). Adapun yang menjadi kesimpulan dari pembahasan hasil peneliian:

- a. Pengelolaan Pantai Lakban: Pengelolaan Pantai Lakban saat ini hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tidak ada kerjasama yang terjalin antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pantai ini.
- b. Kontroversi PT Newmont Minahasa Raya: Terdapat perbedaan pendapat antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan PT Newmont Minahasa Raya terkait dampak lingkungan. LSM menuduh perusahaan melakukan pencemaran laut, sementara PT Newmont membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa mereka telah mematuhi persyaratan pemerintah dan melakukan pemantauan

lingkungan secara berkala, bekerjasama dengan Pemerintah Sulawesi Utara dan Universitas Sam Ratulangi.

- c. Arah Pembangunan Daerah: Pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Sektor pariwisata menjadi salah satu urusan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keunikan dan potensi daerah.
- d. Pentingnya Kolaborasi: Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Lakban di Desa Ratatotok Timur dapat disebut sebagai kemitraan Pemerintah-Swasta-Masyarakat. Model kerjasama ini dianggap sebagai pendekatan sinergis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, di mana ketiga pihak bersama-sama mengembangkan usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Kajian ini menambah aspek kajian pada penelitian yang akan dilakukan, dengan melihat adanya fungsi *collaborative governance* yang digunakan dalam resolusi konflik.

G. Kerangka Konseptual

1. Collaborative Governance

Pemerintah telah menerapkan konsep desa wisata sebagai strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata pedesaan dan meningkatkan ekonomi

lokal. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pengembangan desa wisata memanfaatkan sumber daya dan potensi unik yang dimiliki oleh masing-masing desa, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat setempat, dan sektor swasta. Mengingat kompleksitas pengelolaan desa wisata, implementasi tata kelola yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dalam menganalisis fenomena kolaborasi, berbagai sudut pandang teoretis dapat digunakan sebagai kerangka pemahaman *governance*. John Gerring dan Storm C. Thacker menjelaskan bahwa ada empat model Governance yakni: (1) model anarki, yaitu rendahnya kekuatan pemerintah dalam pengambilan keputusan, tingkat demokrasi yang rendah dan penuh dengan konflik, (2) model *sentralistik*, dimana otoritas dalam pengambilan keputusan terpusat dengan tingkat demokrasi nya rendah, (3) model *desentralistik* yaitu kekuatan politik yang rendah namun tingkat demokrasi tinggi, (4) model *sentripetal* yaitu kekuatan yang tinggi politik dalam pengambilan keputusan dan tingkat demokrasi yang sangat tinggi (Gerring & Thacker, 2008).

Kolaborasi melibatkan proses interaksi yang menghadirkan beragam pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan bersama. Solusi dicapai dengan memadukan gagasan dari setiap pihak yang berperan dalam kerjasama ini, menciptakan saling ketergantungan antar pelaku yang signifikan. Tiga aspek fundamental dalam kerjasama mencakup: pembagian

tugas spesifik untuk masing-masing pihak, struktur kelembagaan yang jelas, dan penerapan koordinasi melalui sistem interaksi operasional. Dalam konteks pengelolaan desa wisata, pola kerjasama semacam ini dapat diamati melalui model tata kelola kolaboratif.

Perkembangan tata kelola pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaboratif) menjadi trend dan fenomena baru yang menarik diteliti dan dikaji. “*Collaborative governance* sendiri telah dikembangkan selama dua dekade terakhir” (Ansell dan Gash, 2008:543). *Collaborative governance* merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara government, civil society, dan private sector dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitariansime dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan society.

Ansell dan Gash (2007: 543) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan strategi baru yang membuat berbagai pemangku kebijakan berkumpul pada suatu forum untuk membuat kesepakatan bersama dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya Ansell dan Gash menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* melibatkan aktor non pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan bersama secara formal dan berorientasi pada konsensus dengan tujuan untuk membentuk atau menjalankan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Secara umum dijelaskan bahwa “*Collaborative Governance* merupakan sebuah yang di dalamnya untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama” (Subarsono, 2016:174).

Ada enam ciri suatu bentuk kerja sama dapat dikategorikan sebagai suatu kolaborasi (Ansell dan Gash, 2007: 544), yaitu:

- a. forum tersebut dibentuk oleh institusi publik;
- b. peserta dalam forum tersebut harus meliputi aktor non pemerintah;
- c. peserta harus terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan dan tidak hanya sekedar berkonsultasi” dengan pihak pemerintah;
- d. forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin
- e. kebijakan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan bersama;
- f. kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik .

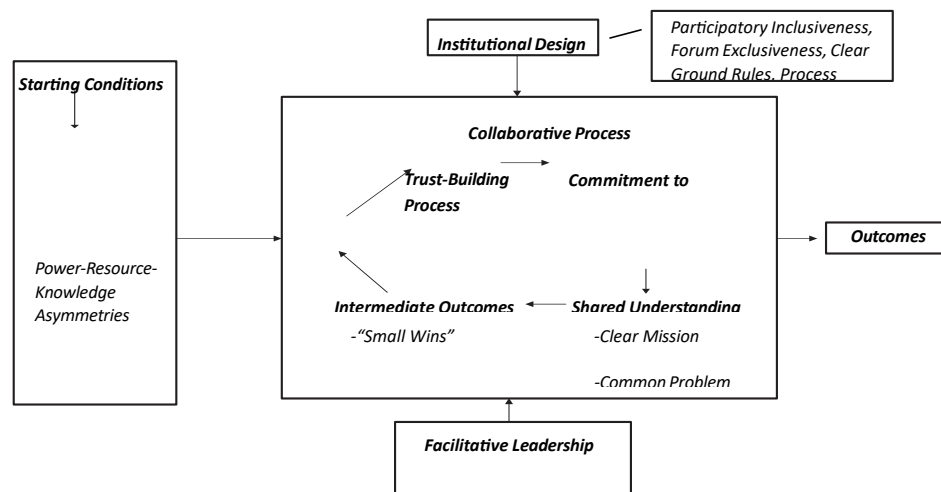
Collaborative governance adalah model untuk mengatasi permasalahan sebab tata kelola bersama menciptakan tanggung jawab bersama atas permasalahan yang terjadi. Dalam melihat suatu permasalahan setiap aktor memiliki pandangan yang berbeda maka dengan itu untuk menciptakan pemahaman di antara aktor tersebut bukanlah hal yang mudah. *Collaborative governance* dijadikan aransemen untuk menjadi penengah agar setiap aktor dapat memiliki pemahaman sama terhadap suatu masalah (Ansell dan Ansell, 2017: 172).

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses yang melibatkan jaringan berbagai organisasi dari berbagai sektor (pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil). Proses ini

bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan tujuan bersama melalui interaksi resmi maupun tidak resmi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan solusi atau mengatasi masalah dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, interaksi yang terjadi bersifat egaliter, di mana setiap aktor memiliki kedudukan yang setara. Karakteristik kesetaraan ini merupakan ciri khas dari model *collaborative governance*.

Untuk menggambarkan sifat saling ketergantungan (interdependensi) yang terjadi, konsep *collaborative governance* merupakan suatu pendekatan yang berupaya untuk menyederhanakan kompleksitas dalam penggabungan atau kolaborasi antara pemerintah, *stakeholder*, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus. Berikut ini adalah model *collaborative governance* menurut Ansell and Gash:

Gambar 1. 1 Model Collaborative Governance Ansell & Gash



Sumber : Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*,
Journal of Public Administration Research and Theory

Model *collaborative governance* yang dirumuskan Ansell and Gash pada tabel diatas terdiri dari empat variabel utama, yaitu:

a. kondisi awal

Tahap awal interaksi antar pemangku kepentingan ditandai oleh perbedaan latar belakang yang dapat menciptakan hubungan asimetris, dengan tiga tantangan utama: ketimpangan sumber daya dan pengetahuan, kebutuhan insentif yang jelas, serta kekhawatiran akan konflik potensial akibat kolaborasi.

b. Desain kelembagaan

Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa desain kelembagaan mengacu pada partisipasi forum kolaborasi, protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan yaitu legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan yaitu pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

c. Kepemimpinan fasilitatif

Menurut Ansell dan Gash, kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi mencakup aspek partisipasi, protokol, dan aturan dasar, dengan penekanan utama pada legitimasi prosedural dan pentingnya keterbukaan serta inklusivitas pemerintah dalam proses tersebut.

d. Proses kolaboratif

Ansell dan Gash menguraikan proses kolaborasi sebagai serangkaian tahapan perkembangan, yang terdiri dari tiga fase utama:

identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan pelaksanaan, yang secara berurutan membentuk kerangka kerja kolaboratif, dapat diuraikan dalam beberapa tahapan, yakni:

a. Dialog tatap muka

Pertemuan langsung antar berbagai pihak di lokasi dan waktu yang sama merupakan komponen krusial dalam memulai *collaborative governance*. Dalam pertemuan ini, terjadi komunikasi interaktif secara langsung untuk membahas kepentingan dan sasaran bersama. Tahap ini sangat penting karena menjadi titik awal *collaborative governance*. Tanpa adanya pertemuan tatap muka, proses *collaborative governance* tidak dapat dimulai. Dalam konteks pengelolaan desa wisata, *collaborative governance* dapat terwujud ketika Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya berkumpul untuk berdialog secara langsung.

b. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan dimulai dengan komunikasi efektif antar pihak, dimana semua peserta kolaborasi harus menunjukkan kredibilitas dan niat baik untuk kepentingan bersama, serta memahami adanya saling ketergantungan yang mendorong kerjasama berkelanjutan.

c. Komitmen terhadap proses

Tahap ini, fokus utama ada pada kesepakatan atau komitmen kolektif untuk menjalankan proses demi mencapai tujuan yang telah

disetujui bersama. Komitmen bersama ini menciptakan saling ketergantungan antar pihak dalam upaya mengatasi masalah dan merumuskan solusi secara kolaboratif.

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama mengacu pada keselarasan persepsi dan interpretasi di antara semua pihak yang berpartisipasi. Ini mencakup pengakuan bahwa forum kolaboratif memiliki tanggung jawab bersama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi secara kolektif. Landasan proses ini adalah nilai-nilai inti yang telah disepakati bersama.

Indikator keselarasan pemahaman ini meliputi kesamaan dalam menghadapi tantangan, menentukan tujuan, menetapkan objektivitas, membangun visi, serta menganut ideologi dasar yang sama. Harmonisasi pemahaman memainkan peran krusial dalam mencapai konsensus saat menginterpretasikan berbagai persoalan.

e. Hasil Sementara

Pencapaian antara yang dihasilkan dari proses kolaborasi yang sedang berjalan disebut sebagai hasil sementara. Hasil ini memiliki potensi untuk menghasilkan efek yang dapat segera dirasakan.

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang *collaborative governance*, dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut diartikan sebagai berbagai pola kerjasama yang dijalankan oleh setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Proses menuju *collaborative governance* terdiri dari lima

tahapan yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu dari tahapan ini tidak terlaksana, maka dapat disimpulkan bahwa model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash gagal diimplementasikan secara efektif.

2. Pengelolaan

Istilah "pengelolaan" berakar dari kata kerja "mengelola", yang merupakan padanan dalam bahasa Indonesia untuk kata dari bahasa asing Italia yaitu *meneggiare* yang artinya menangani alat-alat, berasal dari bahasa latin *manus* yang artinya tangan. Pengelolaan diartikan juga dengan manajemen, sebagaimana yang dikatakan oleh R. Matindas (2002:1) manajemen dapat diartikan sebagai pengelola, sebagai pelaksana dari kegiatan manajemen. Hal ini juga diungkapkan oleh Robbins dan Mery Coulter (2010: 7) manajemen (pengelolaan) adalah hal yang dilakukan oleh manajer.

Berdasarkan perspektif fungsional, tugas seorang manajer meliputi pelaksanaan serangkaian fungsi atau kegiatan spesifik yang bertujuan mengoptimalkan kinerja bawahannya secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen ini terdiri dari empat komponen utama: perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pengarahan melalui kepemimpinan, serta pengawasan dan pengendalian proses kerja.

R. Matindas (2002:1) menjelaskan bahwa, dari perspektif fungsi manajemen proses pengelolaan secara umum terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan kontrol. Keempat fungsi

ini bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi. Meskipun demikian, penerapan spesifik dari fungsi-fungsi tersebut dapat bervariasi, tergantung pada karakteristik organisasi, latar belakang budaya, serta individu-individu yang terlibat di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Solihin (2010: 10) para manajer mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan berbagai sumber daya organisasi yang harus dimiliki, sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia (*Man*). Keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi;
- b. Keuangan (*Money*). Kesalahan pengelolaan keuangan merupakan salah satu penyebab buruknya suatu usaha;
- c. Bahan baku (*Material*). Produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh organisasi;

- d. Mesin-mesin dan peralatan (*Machineries*). Mesin dan peralatan sangat berperan besar dalam penciptaan keuntungan sebuah perusahaan atau organisasi;
- e. Teknologi (*Technologi*). Aplikasi ilmu pengetahuan kedalam sebuah organisasi dapat membantu manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Pasar (*Market*). Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat ditentkan oleh diterima atau tidaknya produk yang ditawarkan;
- g. Informasi (*Information*). Dengan adanya informasi, perusahaan atau organisasi dapat membangun hubungan yang lebih menguntungkan

Sedangkan George R. Terry (2012:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahamisebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran- sasaran yang yelah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Tahapan dari pengelolaan terdiri dari beberapa rangkaian tahap, berikut merupakan tahapan pengelolaan:

- a. Perencanaan(*Planning*).

Perencanaan adalah proses fundamental yang melibatkan penetapan tujuan dan penyusunan strategi, mencakup serangkaian keputusan yang dibuat saat ini untuk mempersiapkan dan mengarahkan tindakan di masa depan.;

b. Pengorganisasian (*Organization*)

Menurut George R. Terry (2012: 233) Pengorganisasian adalah proses mengintegrasikan komponen-komponen suatu entitas sehingga saling terhubung dan mempengaruhi, serta menempatkan individu sesuai kemampuan dan keahlian mereka dalam struktur kerja yang telah direncanakan., dengan kata lain pengorganisasian adalah cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan

c. Penggerakkan (*Actuating*)

Yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan- penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas- aktivitas yang direncanakan. (George R. Terry 2012: 495). Singkatnya pengawasan berguna mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai rencana atau belum. Serta mengawasi pembangunan sumber daya dalam organisasi agar bias terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Pengawasan atau control dilakukan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya;
- b. Apakah dalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan;
- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan;
- d. Untuk meningkatkan efesien dan efektifitas organisasi.

Secara keseluruhan, teori manajemen pengelolaan Terry menekankan perlunya perencanaan yang komprehensif, pengorganisasian yang efektif, kepemimpinan yang kuat, serta pengawasan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

3. Desa Wisata

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang mempunyai suasana pedesaan dan kehidupan sosial, tradisi dan keunikan arsitektur dan tata ruang desa, keunikan kegiatan ekonomi, motivasi dan potensi pengembangan pariwisata. (Priasukmana & Mulyadin, 2001). Suatu desa dapat dijadikan sebagai desa wisata apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Priasukmana dan Mulyadin, 2001):

- a. Akses menggunakan berbagai jenis *transportasi* yang baik untuk memudahkan wisatawan yang akan berkunjung.
- b. Memiliki potensi sumber daya yang menarik seperti alam, kebudayaan, sejarah, makanan tradisional, dan hal lainnya yang dapat dikembangkan

menjadi obyek wisata.

- c. Masyarakat dan aparat desanya menyambut baik dan mendukung hadirnya desa wisata dan juga wisatawan yang datang berkunjung ke desanya.
- d. Keamanan di desa terjamin.
- e. Fasilitas yang baik, kualitas jaringan yang mendukung, dan tenaga kerja yang berkualitas.
- f. Terjangkau dengan destinasi wisata lainnya yang lebih dulu sudah terkenal di masyarakat luas.

Oleh karena itu, definisi desa wisata dapat dilihat sebagai desa yang memiliki karakter pedesaan yang dipertahankan dengan tetap mempertahankan karakter aslinya. Definisi di atas mencerminkan bahwa desa wisata pada hakikatnya adalah daerah pedesaan yang autentik dengan karakternya sendiri.

Keunikan tersebut diwujudkan dalam banyak hal, antara lain sumber daya alam yang berkelanjutan, gaya hidup pedesaan, dan warisan lokal. Semua bidang ini menawarkan peluang pengelolaan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kehidupan daerah pedesaan

Manajemen pelayanan, organisasi, pemasaran strategis, dan sumber daya manusia menjadi hal yang dibutuhkan untuk pengembangan desa wisata. Selaras dengan itu Sumarto (dalam Shintan 2020: 30) mengidentifikasi tiga (3) aktor kunci dalam pengelolaan desa wisata, yaitu:

a. Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan wisata

fasilitator adalah pihak yang memberikan pelayanan berupa bantuan fisik, penyediaan jasa dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan wisatawan maka fasilitas pendukung sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan terhadap destinasi wisata tersebut.

b. Swasta sebagai penyelenggara dan penyedia jasa

Swasta yang bergabung dalam pengelolaan desa wisata biasanya menawarkan jasa yang dibutuhkan wisatawan selama berkunjung untuk menunjang pengembangan desa wisata tersebut, hal tersebut dapat berupa akomodasi yang memudahkan wisatawan. Selaras dengan itu dalam Shintani (2020:31) menjelaskan bahwa akomodasi wisata merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan wisatawan yang sedang melakukan kunjungan wisata, jenis akomodasi yang biasanya dibutuhkan wisatawan ialah penginapan atau *homestay* serta transportasi saat mereka sedang melakukan perjalanan wisata.

c. Masyarakat turut serta berperan dalam pengelolaan wisata

Dalam hal ini dijelaskan bahwa masyarakat turut serta dalam pengelolaan desa wisata yang dilakukan secara langsung baik itu dilakukan secara individual atau berkelompok. Bentuk partisipasi tersebut adalah masyarakat dengan sadar untuk ikut membantu program yang pemerintah berikan dan dengan inisiatif dan kreatifitas, mengambil bagian dalam

pengembangan destinasi wisata atau berpartisipasi dalam upaya pembinaan masyarakat.

Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa otoritas desa mencakup empat bidang utama: administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga desa. Dalam konteks pengelolaan desa wisata, kewenangan desa meliputi pengaturan, pengurusan, dan pelayanan. Hal ini menandakan adanya perbedaan signifikan antara konsep desa wisata dan sekadar kegiatan wisata yang berlokasi di desa. Dalam pengelolaan desa wisata, pihak desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangan wisata benar-benar ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, kewenangan yang dimiliki desa ini mengubah posisi desa dari sekadar lokasi wisata menjadi entitas wisata yang utuh. Dengan demikian, desa tidak lagi berperan sebagai objek pasif dalam kegiatan pariwisata, melainkan menjadi subjek aktif yang mengelola dan mengembangkan potensi wisatanya sendiri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari judul, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selaras dengan judul yang peneliti ambil,

jenis penelitian ini sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dimana peneliti dapat melihat kondisi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini menekankan untuk menggali informasi data, baik data berupa tulisan maupun data secara lisan, serta perilaku informan yang akan peneliti amati ketika berada di lokasi penelitian sehingga peneliti dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi secara terperinci mengenai model pengelolaan Desa Wisata Pulesari di Desa Wonokerto ,Kapanewon Turi ,Kabupaten Sleman.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Wonokerto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian berlangsung selama satu bulan sampai dengan selesai.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian kali ini yaitu kolaborasi pemerintah kalurahan, pengelola, masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada hakikatnya adalah entitas yang menjadi sasaran penarikan kesimpulan. Ini mencakup keseluruhan objek penelitian, termasuk di dalamnya para narasumber yang menyediakan informasi terkait isu-isu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam konteks penelitian kualitatif, subyek penelitian atau narasumber sering kali disebut juga sebagai informan. Informan adalah individu yang dapat

diandalkan untuk memberikan data yang akurat guna melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Terdapat tiga teknik untuk memperoleh informan penelitian yaitu: (1) *Procedure Purposive*, (2) *Procedure Kuota*, (3) *Procedure Snowball* (Burhan Bungin, 2017:73). Dalam menentukan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *procedure purposive* dengan memilih kriteria kelompok peserta yang dianggap relevan dalam memberikan informasi dan menjawab masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang menjadi alat untuk memperoleh data adalah:

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan

No	Nama	Status Sosial	Umur	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
	Riyanto Sulistyio	Lurah Wonerto	41	S1	L
	Dhono	Dukuh Becici	28	S1	L
	Sarjono	Ketua Pokdarwis Kalurahan Wonokerto	32	S1	L
	Didik Irwanto	Ketua Pengelola Desa Wisata Pulesari	32	D3	L
	Ahmad Latifudin	Sekretaris Desa Wisata Pulesari	29	D3	L
	Lasryanti	Masyarakat Pulesari	48	SMP	P
	Sry	Masyarakat Pulesari	52	SMA	P

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Morris (dalam Hasanah, 2017) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan mencatat segala sesuatu fenomena dengan bantuan alat-alat dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau yang lain, lebih jelasnya observasi adalah kumpulan tanggapan mengenai keadaan sekitar.

Dalam studi ini, observasi dimanfaatkan untuk menilai situasi awal di lokasi penelitian. Hasil pengamatan ini menjadi landasan dalam merumuskan latar belakang dan permasalahan penelitian. Metode yang diterapkan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian, bukan sekadar mengamati dari kejauhan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Aspek-aspek yang menjadi fokus pengamatan meliputi: aktivitas di Desa Wisata Pulesari, sistem pengelolaannya, interaksi antar pihak yang terlibat dalam manajemen desa wisata, dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat setempat, serta peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan sektor swasta. Melalui observasi ini, peneliti berharap dapat mengumpulkan data yang relevan dan akurat sesuai dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Teknik wawancara merujuk pada dialog yang terjadi antara peneliti dan responden, atau lebih spesifik, antara pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan

suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya, yaitu informan (John Creswell, 2018).

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan ber panduan pada panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Dalam melakukan wawancara orang yang diwawancarai disebut sebagai informan, dan informan dalam penelitian ini adalah: Lurah Kalurahan Wonokerto, Ketua Pokdarwis, Swasta yang berpartisipasi, dan beberapa masyarakat diarea Desa Wisata Pulesari. Informan tersebut dianggap relevan karena diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata Pulesari, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai alat untuk menganalisa bagaimana *collaborative governance* yang terjadi pada pengelolaan Desa Wisata Pulesari. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka).

c. Dokumentasi

Sugiyono (dalam Nilamsari, 2014) untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, maka studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi dalam metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis dokumen: resmi dan eksternal. Dokumen eksternal mengacu pada informasi yang berasal

dari berbagai lembaga, seperti majalah, surat kabar, pernyataan resmi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi diterapkan dengan cara meminta data terkait dari pihak Kalurahan Wonokerto. Data yang dimaksud dapat berupa peraturan desa, profil Kalurahan Wonokerto, serta laporan-laporan yang relevan dengan topik penelitian.

Tujuan pengumpulan dokumen ini adalah untuk membandingkan teori yang digunakan dengan realitas di lapangan, serta membantu peneliti dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini:

Gambar 1. 2 Alur Analisis Data



(sumber: Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016))

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data yang telah dikumpulkan. Untuk mempermudah peneliti dalam memilah informasi, dilakukan peringkasan data. Tahap ini melibatkan pembuatan ringkasan atau deskripsi, dengan menekankan pada data-data yang relevan tanpa menggunakan model tertentu. Selanjutnya, seluruh data harus ditranskripsikan untuk memberikan gambaran menyeluruh. Jika

ditemukan kekurangan dalam data yang ada, peneliti perlu memperkuat penelitiannya dengan menambahkan data pelengkap.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan aktivitas menampilkan hasil pengumpulan informasi dalam bentuk narasi, visualisasi grafis, dan hubungan antar kategori, yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Selama proses pengujian, jika data yang ada mengalami elaborasi dan rumusan awal didukung oleh temuan-temuan tersebut, maka dibentuklah sebuah model yang konsisten. Model ini kemudian disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah respons terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Meski demikian, ada kemungkinan bahwa pada tahap awal, kita belum dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut secara tuntas. Hal ini karena rumusan masalah pada dasarnya bersifat tentatif dan dapat berkembang seiring berjalannya penelitian.

Untuk mencapai kesimpulan yang sah, diperlukan dukungan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Ini dilakukan dengan cara membandingkan pernyataan teoritis dengan kondisi aktual di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang akurat, yang kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan yang tepat.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WONOKERTO DAN DESA WISATA PULESARI

A. Profil Kalurahan Wonokerto

1. Sejarah Kalurahan Wonokerto

Kalurahan Wonokerto berlokasi di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, wilayah ini dikenal sebagai Desa Wonokerto. Perubahan nomenklatur menjadi Kalurahan terjadi sebagai akibat dari revisi Undang-Undang Keistimewaan.

Pada awalnya, wilayah yang kini dikenal sebagai Wonokerto terdiri dari empat Kalurahan terpisah: Garongan, Ledoklempong, Tunggularum, dan Dadapan. Pada tahun 1946, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan maklumat tentang Pemerintah Kalurahan yang mengakibatkan penggabungan keempat Kalurahan tersebut menjadi satu entitas otonom bernama Desa Wonokerto. Statusnya kemudian dikukuhkan secara resmi melalui Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948, yang mengatur tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

2. Kondisi Geografis Kalurahan Wonokerto

a. Batas Administrasi

Desa Wonokerto merupakan bagian dari Wilayah Administratif Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. B

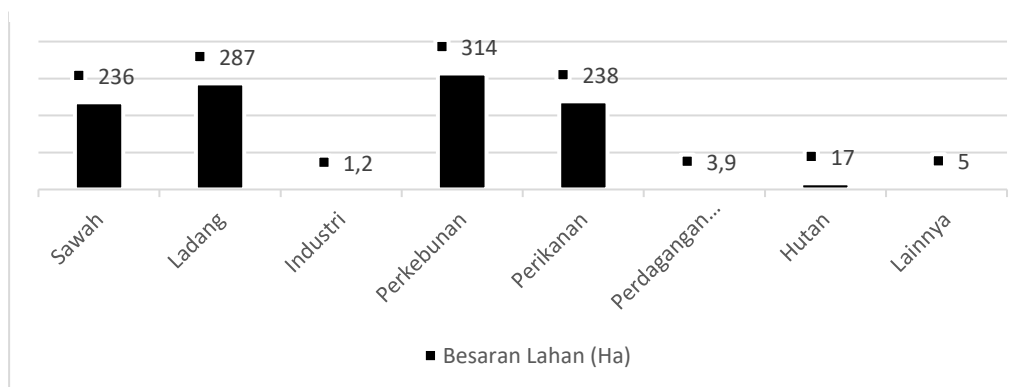
atas-batas wilayah desa Wonokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Desa Girikerto dan Desa Turi;
- 2) Barat: Desa Kaliurang dan Desa Srumbung (keduanya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah);
- 3) Selatan: Desa Donokerto dan Desa Bangukerto (keduanya di Kabupaten Turi);
- 4) Sebelah utara: Desa Girikerto (kecamatan Turi) dan Taman Nasional Gunung Merapi

Kalurahan Wonokerto terbagi dalam 13 padukuhan dan terdiri dari 64 RT dan 29 RW

b. Kondisi Fisik Wilayah

Gambar 2. 1 Jumlah Penggunaan Lahan



Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penggunaan lahan Kalurahan wonokerto diperuntukan untuk lahan pertanian dengan presentase 31,3 %, dan Perkebunan sebesar 18,66%. Hal tersebut menunjukan mayoritas penggunaan lahan peruntukan untuk kegiatan produksi, tentu tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang

dimiliki Kalurahan Wonokerto yang sangat baik. Hal ini juga yang menjadi faktor pendukung pengembangan desa wisata ini.

c. Kondisi Topografi

Kalurahan Wonokerto berada di bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini terletak di lereng barat daya Gunung Merapi, pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 3.908 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 27°C. sebagian besar permukaannya merupakan pertanian dan perkebunan.

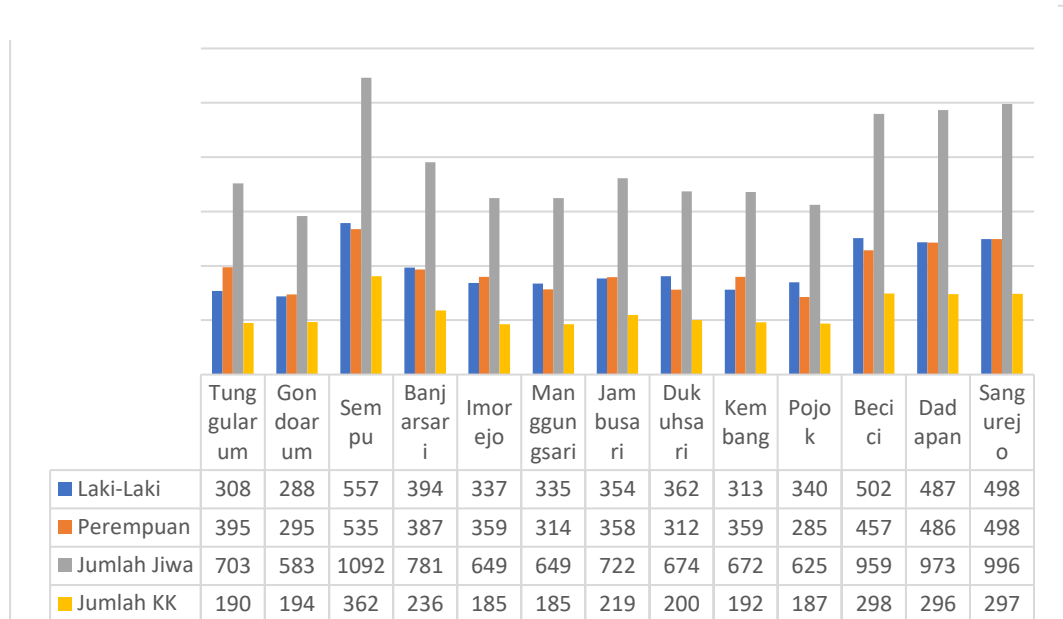
3. Kondisi Demografi Kalurahan Wonokerto

Informasi kependudukan ini memiliki nilai strategis bagi administrasi Kalurahan. Dengan data ini, pihak berwenang dapat memantau perkembangan jumlah warga serta mengidentifikasi besarnya populasi usia produktif. Rincian penduduk berdasarkan kelompok usia di Kalurahan Wonokerto memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi masyarakat setempat. Aspek-aspek demografis mencakup besaran populasi, komposisinya, penyebarannya, serta dinamika perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto pada tahun 2023 adalah 10.079 jiwa dengan rincian 5.062 jiwa laki-laki dan 5.017 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Wonokerto adalah 3.085 KK.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2. 2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin



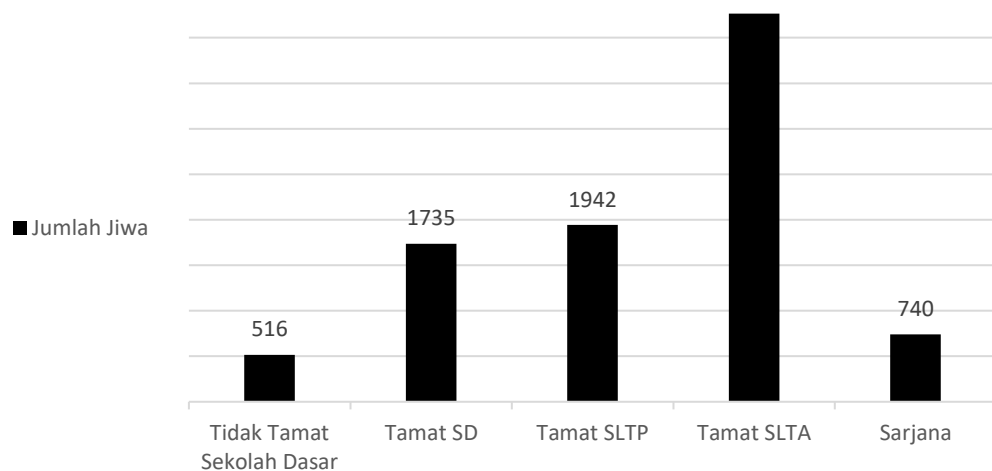
Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto 2023

Grafik tersebut menunjukkan keragaman populasi di setiap Padukuhan di Kalurahan Wonokerto, dengan variasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, Kalurahan Wonokerto memiliki komposisi demografis yang sedikit lebih condong ke populasi laki-laki. Total penduduk laki-laki mencapai 5.075 jiwa, menjadikannya kelompok yang lebih dominan dibandingkan dengan populasi perempuan yang berjumlah 5.050 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Taraf pendidikan di suatu daerah memiliki potensi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Di Kalurahan Wonokerto, upaya untuk meningkatkan kemampuan baca tulis dan menghitung telah menunjukkan hasil yang positif. Usaha mengurangi buta huruf juga telah membuahkan keberhasilan. Untuk gambaran lebih rinci mengenai distribusi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan mereka, data tersebut dapat dilihat pada tabel yang disertakan.

Gambar 2. 3
Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan



Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, terlihat bahwa total penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan setara atau lebih tinggi dari sekolah dasar mencapai 1.917 orang. Di Kalurahan Wonokerto, proporsi warga yang telah menuntaskan pendidikan setingkat SLTA cukup signifikan, yakni 46,3% dari total populasi atau setara dengan 4.264 jiwa. Sementara itu, persentase lulusan tingkat

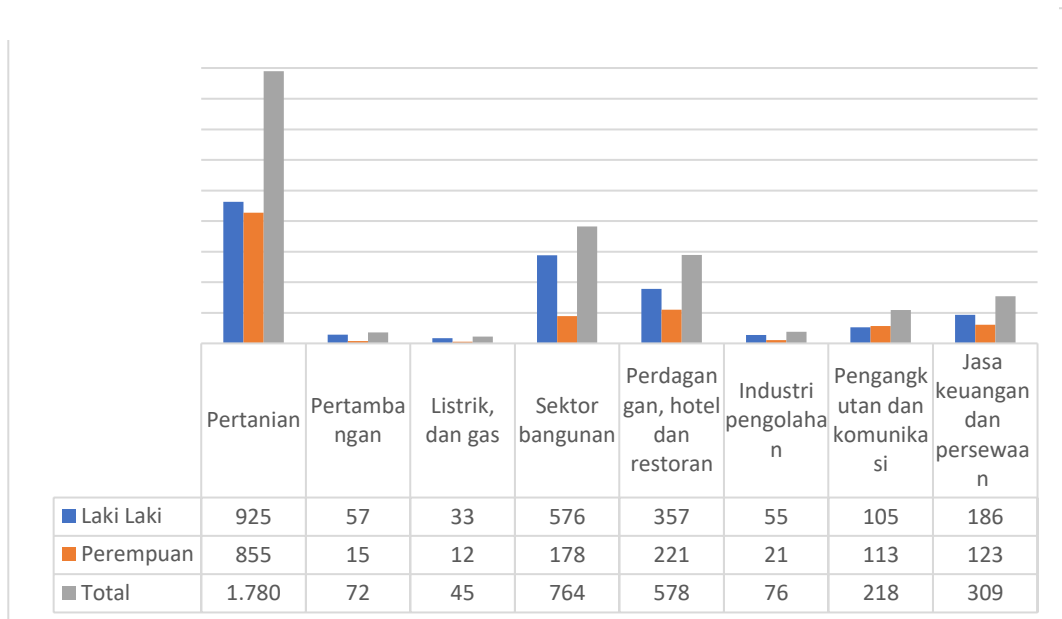
sarjana tercatat sebesar 8,04%, yang mewakili 740 individu dari keseluruhan penduduk..

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mayoritas masyarakat Wonokerto bergantung pada sektor pertanian, lahan yang digunakan peruntukan area penanaman salak dan sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan pasar. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada data berikut ini:

Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Data yang disajikan dalam gambar menunjukkan bahwa total penduduk yang memiliki pekerjaan di Kalurahan Wonokerto mencapai 7.518 orang. Angka ini terdiri dari 4.043 pekerja laki-laki dan 3.475 pekerja perempuan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa sektor pertanian mendominasi lapangan pekerjaan di wilayah ini,

dengan 1.780 orang menggantungkan hidup pada bidang tersebut. Prevalensi sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama di Kalurahan Wonokerto tidak terlepas dari melimpahnya sumber daya alam yang mendukung aktivitas pertanian di daerah tersebut.

4. Kondisi Sosial Ekonomi Kalurahan Wonokerto

a. Kondisi Sosial

Masyarakat Kalurahan Wonokerto masih menjaga dengan baik tradisi kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai kekeluargaan tetap menjadi prioritas, sehingga setiap permasalahan yang muncul cenderung diselesaikan secara kekeluargaan melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Lebih lanjut, ikatan kekerabatan yang erat mendorong warga untuk saling membantu, baik dalam menghadapi kesulitan maupun dalam merayakan momen-momen penting seperti kenduri atau kondangan yang sering diadakan untuk memperingati hari besar Islam dan perayaan lainnya.

Kehidupan bermasyarakat di Kalurahan Wonokerto juga ditandai dengan berkembangnya berbagai organisasi kemasyarakatan yang aktif. Untuk gambaran lebih rinci mengenai organisasi-organisasi yang beroperasi di setiap padukuhan di Kalurahan Wonokerto, informasi tersebut telah disajikan dalam tabel yang disertakan:

Tabel 2. 1
Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan Wonokerto

No	Padukuhan	Jenis organisasi	Penanggung Jawab
1	Tunggularum	Arisan, siskamling, PKK	Ketua RT, Kader PKK
2	Gondoarum	P3A, Karang taruna, PKK, Posyandu Pertemuan RT	Kader PKK Ketua RT
3	Sempu	Siskamling	Dukuh Ketua RW Ketua RT
4	Banjarsari	Siskamling, Karang taruna	LPMD
5	Manggungsari	Siskamling Pertemuan RT	Dukuh, RT/RW
6	Imorejo	Simpan Pinjam Arisan Siskamling, Pengajian, Merti bumi	Dukuh
7	Jambusari	Siskamling	Dukuh
8	Dukuhsari	Arisan, Pengajian, Kenduri	Dukuh, Takmir
9	Kembang	Siskamling	Dukuh
10	Pojok	Siskamling,	Ketua RT, Kepala Dukuh
11	Sangurejo	Siskamling	Ketua RT dan Dukuh
12	Becici	Siskamling	Dukuh dan Ketua RT
13	Dadapan	LPMD, PKK, Lansia, Karang Taruna, Kelompok Ternak Pengajian	Dukuh, RT/RW, Ta'mir Masjid

Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Di Kalurahan Wonokerto, terdapat keragaman organisasi kemasyarakatan dengan total 13 jenis yang berbeda. Organisasi-organisasi ini tersebar di seluruh Padukuhan yang ada di Wonokerto.

b. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kalurahan Wonokerto terdiri dari beberapa sektor utama. Sektor pertanian, yang mencakup perkebunan salak, perikanan, dan peternakan, menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini. Hal ini tercermin dari mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani. Khususnya, pertanian/perkebunan salak pondoh menjadi sumber pendapatan utama dan telah berperan signifikan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.

Sektor jasa dan perdagangan berkembang pesat di padukuhan Tunggularum, Gondoarum, Sempu, Banjarsari, Pojok, dan Sangurejo. Daerah-daerah ini, yang dilalui jalan kabupaten dan provinsi, ditandai dengan keberadaan berbagai usaha seperti swalayan, warung makan, toko kelontong, pasar desa, toko bahan bangunan, dan bengkel.

Pada sektor perikanan tumbuh di padukuhan Kembang, Pojok, dan sebagian Sangurejo, didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang konsisten sepanjang tahun. Daerah ini pun memiliki potensi wisata, yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan atas swadaya masyarakat sendiri, seperti Bumi Perkemahan di Padukuhan Pojok dan Wisata Alam di Padukuhan Tunggularum.

Dalam bidang peternakan, Kalurahan Wonokerto mengembangkan berbagai jenis ternak, meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek/itik, burung puyuh, dan ayam.

c. Kondisi Budaya

Di Kalurahan Wonokerto, perkembangan budaya masyarakat condong ke pertanian yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan. Daerah ini kaya akan beragam kesenian, mulai dari yang bernuansa Jawa tradisional seperti Jatilan, Kurbo Siswo, Dayakan, Badwi, dan Wayang orang, hingga yang bernafaskan Islam seperti Hadroh. Perkembangan pesat kesenian ini tak lepas dari karakteristik masyarakat Wonokerto yang religius dan memiliki kearifan lokal yang kuat dalam berinteraksi dengan sesama.

Penduduk Wonokerto tetap setia melestarikan adat istiadat Jawa mereka. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan berbagai upacara tradisional yang berkaitan dengan siklus kehidupan atau "life circle".

Kalurahan Wonokerto memiliki beragam kegiatan budaya yang dilaksanakan dengan frekuensi berbeda-beda. Upacara tahunan seperti Merti Bumi, Nyadran, dan pertunjukan Jatilan diselenggarakan sekali dalam setahun. Sementara itu, aktivitas budaya lainnya seperti Badui, Hadro, dan Tari Topeng Ireng rutin diadakan setiap minggu sebagai sesi latihan.

Semangat gotong royong masih kuat di kalangan masyarakat Wonokerto. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap minggu di setiap Padukuhan (dusun) yang ada di wilayah Kalurahan Wonokerto. Yang menarik, partisipasi dalam kegiatan gotong royong ini bersifat sukarela, menunjukkan tingginya kesadaran dan kepedulian warga terhadap lingkungan dan komunitas mereka. Keberagaman dan keteraturan pelaksanaan kegiatan budaya ini mencerminkan kekayaan tradisi serta kuatnya ikatan sosial di antara warga Kalurahan Wonokerto.

5. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Wonokerto

Jalan merupakan sarana penghubung baik antar dusun, antar padukuhan, antar Kalurahan, antar Kecamatan, antar Kabupaten maupun antar Provinsi. Komposisi status jalan yang ada di Kalurahan Wonokerto adalah jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kalurahan dan jalan lingkungan. Jalan Provinsi di Kalurahan Wonokerto menghubungkan antara

Kalurahan Candibinangun dan Kalurahan lainnya seperti Kalurahan Wonokerto (Kecamatan Turi), Kalurahan Margorejo dan Wonokerto (Kecamatan Tempel). Berikut adalah tabel kondisi jaringan jalan Kalurahan Wonokerto sebagai berikut:

a. Fasilitas Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto

Tabel 2. 2
Kondisi jaringan jalan Kalurahan Wonokerto

No	Nama Padukuhan (Ruas Jalan)	Status Jalan				Tim RPJMDesa Jalan				Kondisi		
		Provinsi	Kabupaten	Kalurahan	Lingkungan	Aspal	Makadam	Rabat Beton/Cor	Tanah	Baik	Sedang	Rusak
1	Becici	-	5.300	6.750	9.140	750	150	2.010	4.750	4.850	2.450	12.050
2	Pojok	1.250	2.800	2.365	2.600	-	1.515	2.300	2.500	2.065	1.850	6415
3	Sempu	616	2.400	4.620	6.361	-	445	830	2.384	3.422	1.830	7.636
4	Banjarsari	1.500	700	7.400	3.250	-	1.850	4.500	1.500	6.900	1.200	9.600
5	Dukuhsari	-	1.000	6.200	1.850	-	1.300	4.050	900	1.650	4.650	7.200
6	Imorejo	1.000	800	7.100	3.740	-	300	4.860	2.940	300	5.660	8.900
7	Jambusari	-	3.150	2.200	3.150	-	1.290	910	1.000	3.550	800	5.350
8	Manggungsari	-	1.850	5.545	1.350	-	3.050	2.995	1.150	2.650	3.595	7.395
9	Kembang	1.300	1.800	1.220	3.100	400	-	820	-	3.150	1.170	4.320
10	Gondarum	1.000	750	3.050	1.000	-	750	3.050	800	1.500	2.500	4.800
11	Sangurejo	900	1.200	1.800	3.100	-	800	-	-	3.000	900	3.900
12	Dadapan	-	9.550	4.530	11.070	2.910	-	100	7.680	1.750	4.650	14.080
13	Tunggularum	1.000	2.500	3.400	3.500	-	-	3.400	4.000	2.500	400	6.900

Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukan hampir seluruh padukuhan telah terhubung melalui akses jalan tingkat Kalurahan, jalan penghubung dusun adalah jalan-jalan yang berada di lingkungan pemukiman. Aspek sarana jalan dapat dikatakan baik dikarenakan mayoritas jalan sudah di aspal.

b. Fasilitas Pendidikan

Tabel 2. 3
Jumlah sebaran fasilitas pendidikan

No	Nama Padukuhan	PAUD	TK	SD	SMP	SMU/SMK
1	Tunggularum	1	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	-	-
3	Sempu	1	1	1	-	-
4	Banjarsari	-	-	1	1	-
5	Manggunsari	-	1	1	-	-
6	Imorejo	-	1	1	-	-
7	Jambusari	1	-	1	-	-
8	Dukuhsari	1	-	-	-	-
9	Kembang	-	1	1	-	-
10	Pojok	-	-	-	-	-
11	Sangurejo	1	2	1	1	1
12	Becici	1	1	-	-	-
13	Dadapan	-	-	1	-	-
Jumlah		6	7	7	1	1

Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Kalurahan Wonokerto dilengkapi fasilitas pendidikan yang memadai, mencakup berbagai jenjang mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMU/SMK, menunjukkan komitmen daerah ini terhadap penyediaan akses pendidikan yang komprehensif bagi warganya.

c. Fasilitas Perekonomian

Tabel 2. 4
Jumlah sebaran fasilitas perekonomian

No	Padukuhan	Pasar Modern/ Swalayan/ Supermarket	Pasar Tradisional	Toko Bahan Bangunan	Ruko	Toko	Warung / Kios	Warung PKL
1	Tunggularum	1	-	-	-	3	6	1
2	Gondoarum	2	-	-	1	1	4	-
3	Sempu	3	1	2	-	5	29	8
4	Banjarsari	2	-	1	-	3	8	2
5	Manggunsari	-	-	-	-	-	7	-
6	Imorejo	2	-	-	-	-	8	-
7	Jambusari	1	-	-	-	-	7	2
8	Dukuhsari	-	-	1	-	-	11	-
9	Kembang	-	1	-	-	-	8	-
10	Pojok	1	-	-	-	-	11	1
11	Becici	-	-	-	8	14	4	4
12	Dadapan	-	-	-	-	-	13	-

13	Sangurejo	6	-	3	-	-	10	-
Total		18	2	7	9	26	126	18

Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto sangat memadai. Dapat dilihat dari keberadaan pasar tradisional, pasar modern, dan fasilitas pendukung lainnya yang cukup lengkap.

d. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Kalurahan Wonokerto memiliki beragam fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum, termasuk balai kantor Kalurahan, balai pertemuan, kantor dinas, gardu jaga yang tersebar di setiap Padukuhan, stasiun radio amatir, bengkel kerja, kantor partai politik, dan fasilitas lainnya, dengan gardu jaga sebagai fasilitas yang paling banyak jumlahnya, sebagaimana dapat dilihat secara rinci dalam tabel yang disertakan:

Tabel 2. 5
Jumlah sebaran Pemerintahan dan Pelayanan Umum

No	Nama Padukuhan	Balai Kantor Kalurahan	Balai Pertemuan	Kantor Dinas	Gardu Jaga	Radio/TV	Bengkel Kerja	Kantor KUA	Kantor Lain-lain
1	Tunggularum	-	1	-	4	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	4	-	-	-	-
3	Sempu	-	-	-	6	2	-	-	2
4	Banjarsari	-	1	-	3	-	-	-	-
5	Manggungsari	-	-	-	2	-	-	-	-
6	Imorejo	1	1	-	4	-	-	-	-
7	Jambusari	-	-	-	4	-	4	-	-
8	Dukuhsari	-	-	-	5	-	5	-	-
9	Kembang	-	1	-	3	-	7	-	-
10	Pojok	-	-	-	4	-	1	-	-

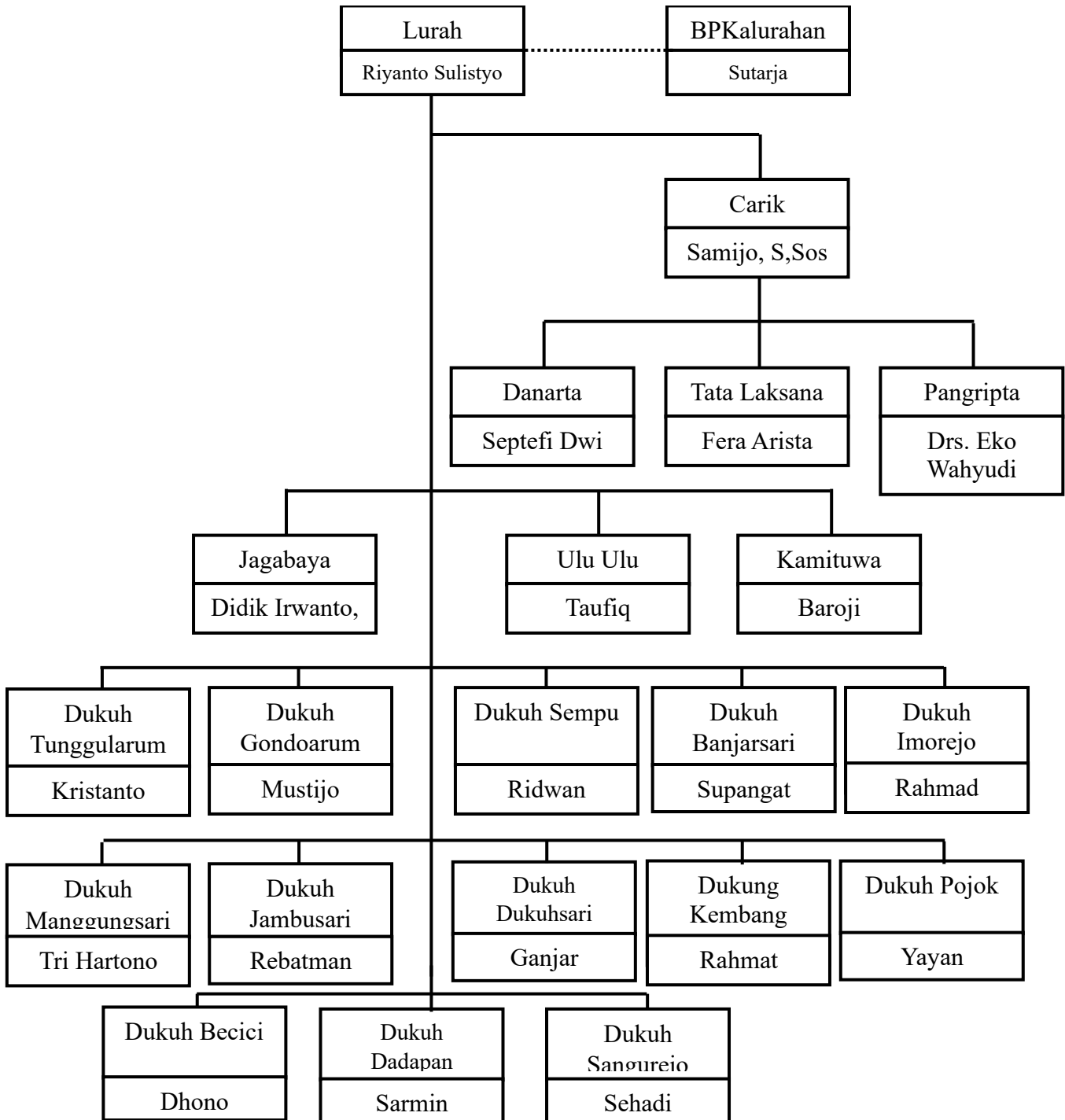
11	Sangurejo	-	-	1	4	-	6	1	-
12	Becici	-	-	-	8	-	2	-	-
13	Dadapan	-	-	-	6	-	2	-	-
Total		1	4	1	57	2	27	1	2

Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Wonokerto

Berdasarkan UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, struktur pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan, dengan Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, yang detailnya untuk Kalurahan Wonokerto dapat dilihat pada tabel yang menyajikan nama dan jabatan pejabat setempat.. Berikut adalah Struktus pemerintah Kalurahan Wonokerto berdasarkan nama dan jabatan sebagai berikut:

Gambar 2. 5
Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto



Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Struktur pemerintahan Kalurahan Wonokerto mencerminkan sistem yang komprehensif dan seimbang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Kalurahan didukung oleh berbagai perangkat yang berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan dan program kerja, bertujuan untuk memajukan dan memandirikan Kalurahan. Struktur ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016, yang menetapkan susunan organisasi pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.

Sebagai penyeimbang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi mengawasi kinerja pemerintah Kalurahan. BPD, yang anggotanya dipilih secara demokratis, berperan sebagai wakil masyarakat dan mitra pemerintah Kalurahan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan di Kalurahan Wonokerto.

Berikut daftar keanggotaan BPD Kalurahan Wonokerto yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6
Daftar nama anggota BPD Kalurahan Wonokerto

No	Nama	Jabatan
1	Sutarja	Ketua
2	Sunarja, A.Md	Wakil Ketua
3	Siti Yuningsih, A.Md	Sekretaris
4	Sugito, S.Pd	Ketua Pokja Pemerintahan
5	Dari Sri Anto Hadi, ST	Ketua Pokja Pembangunan
6	Sunyoto	Anggota
7	Sri Eka Mardiyana	Anggota
8	Sumarjana	Anggota

Sumber: RKP Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Demi keberlangsungan pemerintahan yang baik (*good governance*) BPD sebagai wakil kelompok masyarakat memiliki peran penting yaitu sebagai penampung dan aktor penyalur aspirasi masyarakat memiliki peran

penting yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah Kalurahan serta mengawasi dan memberi evaluasi terhadap proses pemerintahan di Wonokerto.

B. Profil Desa Wisata Pulesari

1. Sejarah Desa Wisata Pulesari

Dusun Pulesari, yang terletak di bagian barat lereng Gunung Merapi, merupakan bagian dari Kalurahan Wonokerto. Daerah ini memiliki kekayaan alam dan tradisi budaya yang masih terjaga dengan baik. Keunikan ini mendorong upaya pengembangan Dusun Pulesari menjadi destinasi wisata desa yang menarik bagi para pengunjung.

Setelah letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, penduduk di sisi barat lereng gunung, termasuk masyarakat Dusun Pulesari, mengalami dampak ekonomi yang signifikan. Mayoritas penduduk yang menggantungkan hidup pada pertanian salak menghadapi penurunan pendapatan akibat tanaman mereka terkena abu vulkanik. Untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti semula, diperlukan proses yang memakan waktu sekitar dua tahun, meliputi perawatan, penanaman kembali, dan upaya pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

Ide Desa Wisata Pulesari muncul dua tahun setelah erupsi Gunung Merapi pada 2010. Kekayaan alam yang masih alami, serta tradisi dan budaya yang terpelihara dengan baik, menginspirasi pengembangan Dusun

Pulesari sebagai destinasi wisata. Pak Sarjana dan Pak Didik Irwanto, bersama tokoh masyarakat lainnya, menjadi pelopor inisiatif ini.

Awalnya, gagasan ini mendapat penolakan dari warga karena kurangnya pengalaman dalam mengelola desa wisata, terbatasnya pemahaman, dan kebiasaan bertani salak yang sudah mengakar. Namun, dengan usaha keras dan komunikasi yang terus-menerus, akhirnya masyarakat yakin akan potensi Dusun Pulesari sebagai desa wisata.

Konsep yang diusung adalah "dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali ke masyarakat". Pendekatan ini menjadi landasan bersama dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari. Seluruh proses, mulai dari pembangunan hingga pengelolaan, sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat setempat yang berperan sebagai investor, tanpa melibatkan pihak luar.

Desa Wisata Pulesari merupakan inisiatif mandiri yang tumbuh dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Didasari komitmen bersama untuk melestarikan dan mengembangkan potensi lokal, ide pembentukan desa wisata ini muncul. Konsep pariwisata mulai dicanangkan pada 26 Mei 2012, dan secara resmi diluncurkan serta diresmikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman pada 9 November 2012.

Desa wisata ini mengusung konsep wisata alam dan budaya tradisional. Tujuannya adalah memanfaatkan potensi alam yang luar biasa secara bijak, tanpa mengubah esensi kehidupan pedesaan. Selain itu, upaya pelestarian budaya tradisional juga menjadi fokus utama untuk menjaga warisan leluhur di tengah arus modernisasi.

Tujuan utama pengembangan Desa Wisata Pulesari adalah memberdayakan sumber daya manusia dan alam setempat. Harapannya, desa wisata ini dapat dikenal dan diakui secara luas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan yang autentik.

2. Letak Administratif, Demografi dan Geografi

Dusun Pulesari merupakan bagian dari Padukuhan Becici yang terletak di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas-batas wilayahnya meliputi Dusun Arjosari di timur, Kalurahan Bangunkerto dan Dusun Wonosari di barat, Dusun Kopen di selatan, dan Dusun Ledok Lempong di utara.

Masyarakat Dusun Pulesari memiliki keunikan budaya yang membedakannya dari dusun-dusun lain, mencerminkan keanekaragaman Indonesia. Namun, semangat persatuan tetap terjaga, tercermin dalam gotong royong masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Upacara Adat Pager Bumi yang rutin digelar setiap Bulan Sapar Rabu Pungkasan.

Kalurahan Wonokerto, di mana Dusun Pulesari berada, memiliki luas wilayah 20,5 Ha. Wilayah ini terbagi atas beberapa fungsi lahan, termasuk sawah/pertanian, ladang/tegalan, perkebunan, pemukiman, industri, area perdagangan dan jasa, serta hutan rakyat. R

3. Logo dan Arti Desa Wisata

Gambar 2. 6
Logo Desa Wisata Pulesari



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari

- a. Rumah berwarna coklat/oranye: Mewakili sifat alami, kehangatan, dan stabilitas. Warna ini menciptakan suasana nyaman, elegan, dan aman. Juga mendorong rasa keyakinan dan komitmen, serta memberikan kesan akrab dan menenangkan.
- b. Gunung berwarna hijau: Melambangkan lokasi desa di lereng Gunung Merapi. Warna hijau mengandung makna keberuntungan, kebijaksanaan, kelembutan, kedamaian, dan kecintaan pada desa. Juga memberi kesan sejuk dan tenang.
- c. Tulisan "Desa Wisata" berwarna coklat/oranye: Menekankan kembali makna positif seperti keberuntungan, kebijaksanaan, kelembutan, kedamaian, dan kecintaan pada desa. Warna ini juga menambahkan nuansa ketenangan.
- d. Tulisan "Wisata Alam dan Budaya Tradisi" berwarna hijau: Menghubungkan dengan kesegaran alam, energi positif, dan ketenangan. Warna ini juga melambangkan penyembuhan,

keseimbangan emosi, dan keanggunan. Bertujuan membangkitkan empati pengunjung dan mengundang mereka untuk berwisata.

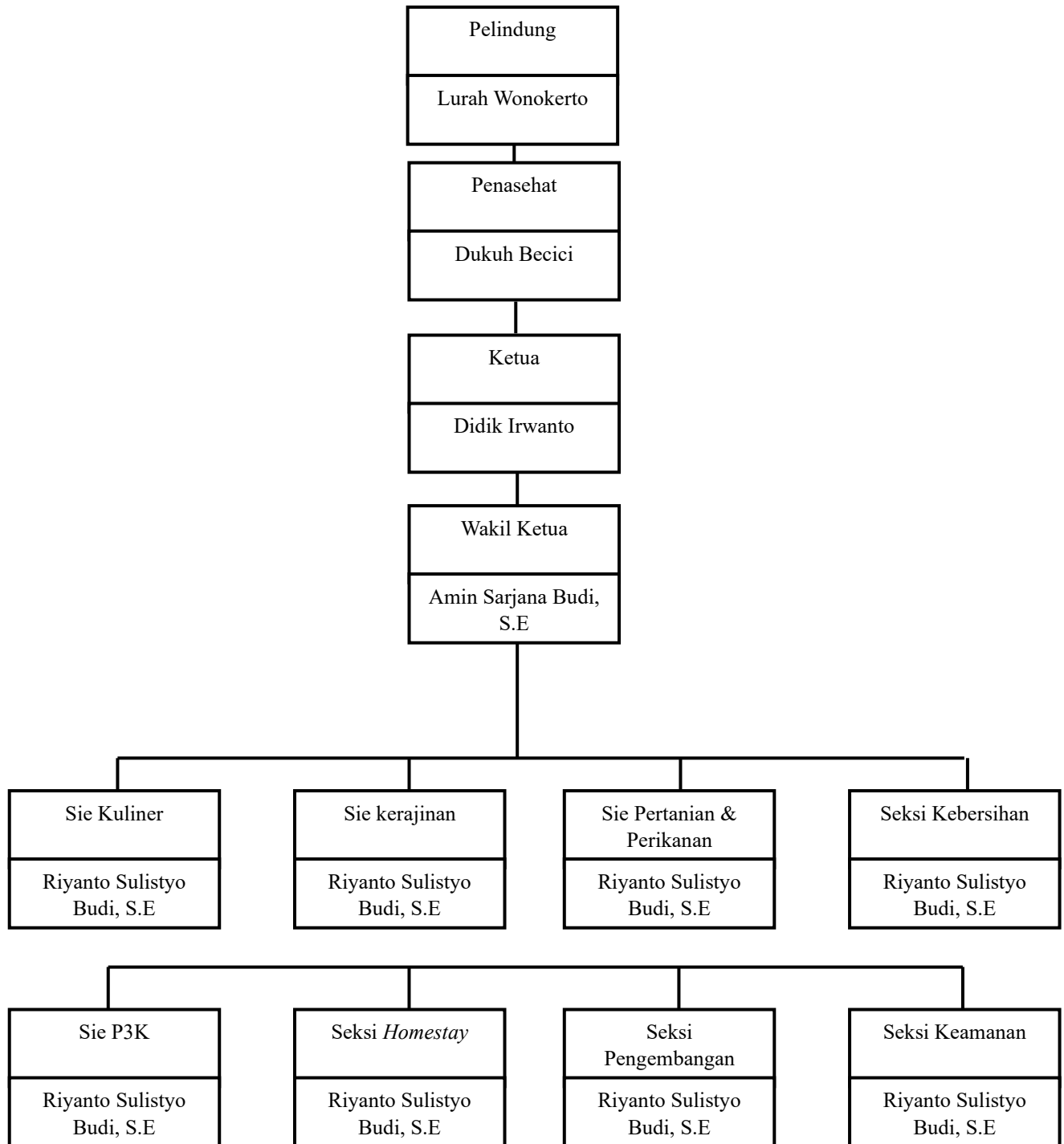
- e. Slogan Desa Tradisi (Tradisi: **T=tentram, A=aman, DI=dinamis, S=sehat, I=indah**). Desa tradisi dalam sebuah arti bahwa Desa ini sangat kuat akan ideologi tradisi akulturasi masyarakat yang bersifat religius yang telah terbentuk secara turun temurun seiring dengan perkembangan zaman sehingga disebut tradisi tidak melupakan nilai budaya yang ada untuk selalu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat tradisional.

4. Struktur Lembaga/Organisasi

Desa Wisata Pulesari dikelola melalui sistem organisasi yang terstruktur. Pengelolaannya melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga dengan struktur kepengurusan yang jelas. Organisasi ini terdiri dari berbagai divisi yang, meskipun memiliki fungsi berbeda, saling terkait dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Struktur kepengurusan Desa Wisata Pulesari terdiri dari beberapa posisi dan divisi, yang bersama-sama bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Struktur kepengurusan Desa Wisata Pulesari Tergambar dibawah ini:

Gambar 2. 7
Struktur Organisasi Pengelola Desa Wisata Pulesari



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari

5. Visi dan Misi

a. Visi

“Menciptakan sebuah wujud Desa Wisata Pulesari yang bersih, aman, nyaman, tentram, dinamis serta seni dan budaya religius yang berkualitas untuk menjadikan Desa Wisata Pulesari Edukasi masyarakat tradisional.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motivasi dan komitmen bersama membangun pola pikir yang rasional.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya tradisi masyarakat tradisional.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDA) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkualitas berkembang.
- 4) Mengutamakan kualitas Desa Wisata dibandingkan kuantitas.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun Desa Wisata yang bersih, aman dan nyaman.

6. Potensi Desa Wisata

Desa Wisata Pulesari, meskipun berjarak sekitar 23 km dari Kota Yogyakarta, menawarkan beragam atraksi menarik seperti Goa Sejarah, tracking sungai, wisata kebun salak, perikanan, kerajinan, kuliner, outbound, serta fasilitas homestay dan pendopo, ditunjang oleh berbagai fasilitas umum seperti masjid, mushola, gardu ronda, toilet umum, dan

gardu gedek, menjadikannya destinasi wisata yang patut dikunjungi.

Adapun objek Desa Wisata Pulesari dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 8
Goa Sejarah



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari Tahun 2023

Gua tua bersejarah ini pernah menjadi tempat persembunyian warga Dusun Pulesari pada masa penjajahan Jepang. Saat ini terdapat enam gua: Gua Dhampar, Gua Chankuk, Gua Leli, Gua Wayang, Gua Ural, dan Gua Marin.

Gambar 2. 9
Tracking sungai



Sumber: Dokumentasi (28-07-2024)

Penelusuran sungai merupakan salah satu kegiatan wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Menyusuri aliran sungai yang sangat menarik dan menikmati keindahan alam pedesaan sekitar, wisatawan bisa menikmati gemericik air yang mengalir dari Gunung Merapi sehingga menciptakan suasana menarik bagi wisatawan di Pulesari. Kendaraan penelusuran sungai seperti Jembatan Goyang, jembatan penyeberangan bambu, jaring laba-laba vertikal, pondok hujan, tangga air, wadah ban, jaring laba-laba, sarang laba-laba, air terjun, dll juga tersedia.

Gambar 2. 10
Wisata kebun salak



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari Tahun 2023

Wisata kebun salak, yang disebut wisata agribisnis, merupakan atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan yang memetik sendiri buah salak di taman ular dan memakan buah salak sebanyak-banyaknya. Namun jika Anda ingin mendapatkan buah salak dari kebun, Anda perlu membeli buah salak yang Anda bawa. Wisata kebun salak ini akan mengedukasi wisatawan tentang budidaya salak tambak dan pemeliharaan taman berdasarkan SOP budidaya salak, serta wisatawan dapat menikmati ciri khas desa wisata dalam pesta kebun di kebun salak.

Gambar 2. 11
Perikanan



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari Tahun 2023

wisata memancing akan disuguhkan kepada wisatawan agar dapat menikmati kegiatan memancing. Pengelola wisata hanya menyewakan alat pancing dan umpan, dan hasil penangkapan ikan dihitung sendiri-sendiri dalam kg sesuai harga pasar umum berdasarkan hasil penangkapan ikan yang telah ditentukan. Ada pula kegiatan penangkapan ikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menangkap ikan di kolam.

Gambar 2. 12
Kesenian Kubro siswo



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari Tahun

2023

Gambar 2. 13
Kesenian tari salak



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari Tahun

2023

**Gambar 2. 14
prajurit/bregodo**



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari Tahun 2023

Gambar 2. 15 Upacara adat pagar bumi



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari Tahun 2023

- a. Pertunjukan Kubro Siswo merupakan bentuk kearifan lokal bernuansa religi yang dikolaborasi dengan gamelan dan musik-musik bernuansa islam sehingga bisa menjadi sebuah sajian Tarian Budaya Religius.
- b. Tarian salak merupakan manifestasi dari mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani salak dalam merayakan hasil panen dan bentuk rasa syukur.
- c. Bregodo/prajurit merupakan gerakan barisan yang dilatih secara khusus yang pada zaman dahulu dimiliki oleh kerajaan-kerajaan untuk mengiringi raja atau permaisuri ketika bepergian. Saat ini telah dikembangkan oleh masyarakat Dusun Pulesari untuk mengiringi kegiatan upacara adat dan kegiatan budaya.

Gambar 2. 16 Kerajinan Desa



Tujuan dari Kerajinan Desa Wisata Pulesari ini adalah untuk memperkenalkan berbagai jenis kerajinan tangan yang perlu dilestarikan untuk menambah pengetahuan dan pendapatan. Jenis kerajinan yang ada di Desa Wisata Pulesari adalah kerajinan imitasi sebanyak buah, kerajinan rajut, kerajinan pandai besi, dan kerajinan pertukangan.

Gambar 2. 17 Wisata Kuliner



Wisatawan dapat menikmati berbagai macam makanan khas desa wisata dan mengenal kuliner pedesaan. Ada masakan khas desa wisata seperti sego megono, pepes nira, dan sego pesel, serta minuman khas desa wisata seperti jesel, kolak salak, dan wedang jablan.

Outbound merupakan area permainan yang bersifat memberikan edukasi tentang kekompakan dalam sebuah team dalam melakukan sebuah

kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat dua jenis *outbound* yaitu, *outbound training* terdiri dari, Jaringan Rintangan Air, Tangga Tebing Goyang, Merangkak Ban Diatas Air, Gubug Hujan dan Lompatan Ban diatas Air. Kemudian ada juga kegiatan *outbond* yang terdiri dari, Menangkap Ikan, Mengisi Air Bumbung, Sandal Bakiak.

Gambar 2. 18 Homestay



Homestay merupakan penunjang bagi wisatawan yang ingin bermalam sambil melakukan aktivitas tamasya. Bangunan homestay terdiri dari rumah-rumah penduduk desa yang berada di sekitar desa wisata, dimana masyarakat dan wisatawan diharapkan dapat berinteraksi langsung dan mengetahui aktivitas sehari-hari masyarakat pedesaan. Fasilitas homestay antara lain rumah sederhana bergaya pedesaan, ruang tidur, kasur, selimut, bantal, dan bathtub/toilet.

1. Proses Berwisata

Desa Wisata Pulesari menawarkan beragam kegiatan wisata berdasarkan konsep wisata alam dan budaya tradisional. Pesona Desa Wisata Pulesari adalah pemandangan Gunung Merapi yang membuat tempat wisata ini memiliki suasana alam yang unik. Selain wisata alam dan budaya tradisional, ciri khas desa wisata Pulesari dibandingkan desa wisata lainnya adalah adanya tanaman salak yang menjadi salah satu sumber daya

wisata yang ditawarkan. Untuk menikmati aktivitas di Desa Wisata Pulesari, wisatawan dapat memesan paket wisata yang ditentukan oleh pengelola Desa Wisata Pulesari .

. Berikut paket wisata yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

- a. Paket wisata 1 hari terdiri dari paket tradisi 1, paket tradisi 2, paket tradisi 3 dan paket tradisi 4 dengan kapasitas minimal 20 sampai 25 orang dan dengan biaya yang mulai dibandrol dari harga Rp. 55.000, sampai harga Rp. 105.000. Paket wisata 1 hari yang terbagi dari 4 paket tradisi juga mempunyai fasilitas yang berbeda-beda sesuai yang dipesan oleh wisatawan.
- b. Berbeda dari paket wisata 1, paket wisata makrab dilakukan 2 hari 1 malam, dimana wisatawan akan bermalam di *homestay* dan juga dukungan fasilitas yang lainnya. Kapasitas wisatawan minimal 20 orang dengan harga untuk Malam Keakraban sebesar Rp. 145.000 dan *Gathering Live In* sebesar Rp. 185.000.

BAB III
PEMBAHASAN
***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DESA**
WISATA PULESARI

Desa Wisata Pulesari diresmikan sejak 26 Mei 2016, peresmian sebagai Desa ini diresmikan langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Pada kajian ini peneliti memfokuskan pada pengembangan wisata menggunakan *Collaborative Governance*, *Collaborative Governance* menurut Ansel and Gash adalah proses membuat suatu Keputusan dengan melibatkan Lembaga politik dan pihak lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dengan kata lain *Collaborative Governance* berbicara mengenai kerja sama antara dua pihak atau lebih stakeholder untuk mengelola sumberdaya yang sama.

Berikut adalah analisis terkait *Collaborative Governance* pada pengelolaan Desa Wisata Pulesari:

A. Perencanaan Desa Wisata Pulesari

Perencanaan merupakan bagian pertama dan fundamental dalam fungsi manajemen. George R. Terry dalam (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengembangan desa wisata merupakan upaya mengubah suatu desa menjadi destinasi pariwisata. Proses ini memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki desa, termasuk kekayaan alamnya, penduduk setempat, tradisi budaya, serta adat istiadat yang masih dijunjung. Selain itu, berbagai potensi unik yang ada di desa juga diintegrasikan, di mana semua elemen ini saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan daya tarik wisata yang komprehensif.

Dalam melihat kolaborasi yang terjadi pada perencanaan Desa Wisata Pulesari harus memperhatikan juga aktor-aktor yang terlibat dalam hal tersebut, karena dalam perencanaan kolaboratif perencanaan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemangku kepentingan, terkait kajian kali ini pemangku kepentingan diantaranya adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto, masyarakat dan elemen-elemen masyarakat yang terlibat.

Desa wisata Pulesari sejatinya berdiri murni berdasarkan ide dan gagasan masyarakat, bermula dari adanya inisiasi dari dua orang yakni pak Didik dan pak Sarjono, dilanjutkan dengan semangat gotong-royong masyarakat yang mendorong terbentuknya Desa Wisata Pulesari

Kaitannya dengan perencanaan, wawancara bersama mas Didik, beliau menuturkan:

“Desa Wisata Pulesari ini merupakan suatu ide dan gagasan yang murni muncul atas keinginan masyarakat disini. Mulai dari modal pengelola dan sebagainya semuanya bersasal dari masyarakat sekitar dusun Pulesari. Pemerintah Desa Wonokerto disini lebih berperan dalam mengawasi dan memfasilitasi apa kekurangan kami” (wawancara, 25-07-2024)

Hal tersebut menunjukkan adanya inisiatif aktif dari masyarakat dalam proses awal perencanaan Desa Wisata Pulesari, tentu inisiatif tersebut terdorong oleh

adanya partisipasi masyarakat yang turut serta mendukung hal tersebut. Sebagaimana penjelasan tersebut, hal yang serupa juga diungkapkan oleh pak Sarjono sebagai mantan Ketua Pengelola Desa Wisata Pulesari:

“Pembangunan wisata Pulesari dimulai setelah letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Peristiwa ini dikenal luas oleh pemerintah dan masyarakat. Dampak terparah terjadi di sisi timur gunung, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Meskipun Pulesari terletak di lereng barat Merapi, daerah ini juga terkena dampak, namun tidak separah sisi timur. Di Pulesari, dampaknya tidak berupa kerusakan infrastruktur atau korban jiwa, melainkan lebih bersifat tidak langsung” (Wawancara, 26-07-2024)

Wawancara tersebut menunjukkan dampak Gunung Merapi di wilayah Padukuhan Becici terutama bersifat ekonomi, bukan merupakan korban jiwa. Pertanian sebagai salah sumber mata pencaharian utama di desa ini, khususnya perkebunan salak, mengalami kerusakan parah. Hal ini sangat merugikan masyarakat setempat, mengingat mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada pertanian salak sebagai sumber penghasilan utama. Meski demikian, Padukuhan Becici relatif beruntung dibandingkan daerah lain yang lebih dekat dengan Merapi. Karena lokasinya yang cukup jauh dari pusat erupsi, desa ini terhindar dari kerusakan infrastruktur yang parah. Yang lebih penting lagi, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di wilayah ini akibat letusan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan adanya dorongan dari luar terhadap masyarakat untuk berinisiatif membangun Desa Wisata Pulesari. Dampak erupsi gunung merapi yang sangat berpengaruh pada mata pencaharian warga sebagai petani salak, memicu inisiatif masyarakat membangun Desa Wisata Pulesari sebagai upaya swadaya untuk mengembalikan stabilitas ekonomi di desa.

Adapaun dalam proses perencanaan awal desa wisata Pulesari diungkapkan juga pak Sarjono:

“Setelah Gunung Merapi meletus tahun 2010, warga desa ini mengungsi ke UNY selama sekitar dua bulan. Di sana, mahasiswa UNY mengajarkan warga cara membuat desa wisata. Ide ini untuk membantu desa bangkit lagi setelah bencana. Ketika pulang ke desa, semua warga setuju untuk membuat desa wisata. Mereka bekerja sama - anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ikut membantu. Mereka melakukan ini atas kemauan sendiri, tanpa bantuan investor dari luar. Jadi, pembangunan desa wisata ini murni hasil kerja keras dan gotong royong warga desa. Mereka ingin membuat sesuatu yang baru untuk memajukan desa mereka setelah terkena dampak letusan gunung”

Setelah Gunung Merapi meletus, kebun salak warga rusak. Ini merupakan masalah besar, karena banyak warga bekerja sebagai petani salak kehilangan penghasilan utama mereka. Hal tersebut juga menunjukkan adanya orang dari luar desa yang memberi ide untuk membuat desa wisata. Ide ini membuat warga semangat. Mereka berpikir desa wisata bisa jadi cara baru untuk mendapat penghasilan. Dengan melibatkan seluruh masyarakat, bekerja sama membangun Desa Wisata Pulesari, pada dasarnya konsep desa wisata ini pun dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat.

Upaya pemulihan ekonomi setelah letusan Gunung Merapi telah menghasilkan sebuah ide alternatif dalam upaya pemulihan ekonomi, berupa pengembangan Desa Wisata Pulesari, yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat setempat melalui semangat gotong royong mereka. Keberhasilan inisiatif ini juga ditunjang oleh kekayaan sumber daya alam yang terdapat di kampung Becici

Pada perencanaan pemerintah kalurahan juga ikut andil namun secara tidak langsung, hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama Lurah Wonokerto, beliau menuturkan:

“Desa Wonokerto memiliki beberapa desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Pulesari. Desa wisata tersebut dibangun paska bencana letusan merapa 2010 silam, Kami mempertimbangkan dampak situasi ini dan berupaya menemukan solusi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah erupsi, kami melihat potensi pengembangan pariwisata di sisi timur. Kami juga ingin mengembangkan potensi serupa di sisi barat. Kami mencari usaha yang cocok untuk dikembangkan bersama, dan konsep desa wisata muncul sebagai pilihan ideal, dari pemerintah kalurahan tentunya kami mendukung penuh dalam memfasilitasi setiap pendukung dalam proses awal berdirinya miasalnya loby ke instansi terkait”(wawancara, 26-07-2024)

Wawancara tersebut menunjukan pemerintah desa tidak terlibat jauh dalam proses awal perencanaan desa wisata tersebut, keterlibatan mereka juga adalah respon dari adanya masyarakat yang lebih dulu menginisiasi pembangunan desa wisata. Keterlibatan pemerintah kalurahan disini lebih terlihat pada proses-proses administrasi dalam perencaan pembentukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas diketahui bahwa Desa wisata Pulesari sejatinya berdiri atas inisiatif masyarakat sendiri. Perencanaan Desa Wiswata Pulesari murni hasil inovasi dan kreativitas masyarakat yang digagas oleh pak Sarjono dan Pak Didik, Pengembangan Desa Wisata Pulesari berlandaskan pada prinsip swadaya masyarakat. Inisiatif ini muncul dari rasa kebersamaan dan kesamaan tujuan di antara penduduk setempat. Dalam hal kolaborasi pada tahap perencaaan disini tidak terlihat adanya kontribusi langsung dari pemerintah desa dalam hal perencanaan, bentuk aksi yang dilakukan pemerintah kalurahan sejatinya merupakan respon terhadap inisiatif

yang telah lebih dulu dilakukan masyarakat untuk membangun Desa Wisata Pulesari, hal ini menunjukkan belum terbentuknya kolaborasi dalam perencanaan Desa Wisata Pulesari .

B. *Organizing* (Pengorganisasian) dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari

Pada dasarnya, proses pengorganisasian melibatkan penataan struktur organisasi dengan mempertimbangkan tiga faktor utama: tujuan yang ingin dicapai, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lingkungan sekitar. Penyusunan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara elemen-elemen tersebut.

Organisasi Pengelola Desa Wisata Pulesari secara legalitas ada pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 27 tahun 2015. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Pulesari dengan membentuk struktur kepengurusan dan melakukan pembagian tugas pada masing-masing unit pelaksanaannya, dibawah koordinasi dan pembinaan dari pemerintah desa. Hal ini seturut dengan penuturan pak Sarjono dalam wawancara:

“pengelolaan Desa Wisata Pulesari berbasis dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tentunya dengan demikian pengelolaan tersebut dengan kemandirian masyarakat, semua yang terlibat dalam struktur pengurus pengelola merupakan anggota kelompok wisata pulesasari yang terdiri dari seluruh masyarakat dusun pulesari. Tentunya tetap harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk keselarasan. ” (wawancara, 26-07-2024)

Tahapan pengorganisasian kaitannya pada *collaborative governance*, harus memastikan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, yakni pemerintah desa, pengelola desa wisata, dan masyarakat.

Berdasarkan struktur pengurus Pengelola Desa Wisata Pulesari yang terdapat pada AD/ ART, hubungan antara Pengelola dan Pemerintah Desa hanya terhubung melalui hirarki garis koordinasi, dengan demikian pemerintah desa bukan bagian langsung dari struktur pengurus.

Adapun wawancara bersama pak Sarjono, beliau menuturkan:

“Di Awal 2012 itu pembentukan Pokdarwis itu karena sifatnya wajib artinya wajib bagi yang mendirikan desa wisata harus disertai dengan pembentukan Pokdarwis itu satu legitimasi atau satu SK. Namun dalam perjalanannya akhirnya ada kecocokan harmonis artinya kebijakan-kebijakan yang diambil dari Pokdarwis itu sebagai pelaksana kegiatan adalah pengelola. Namun kalau disini itu bedanya gini, orang Pokdarwis juga orang pengelola, ketua Pokdarwis juga saya dan ketua pengelola juga saya karena memegang kepentingan bersama. Namun di tahun 2022 atau 2021 kemarin itu ada aturan pemerintah yang mengharuskan Pokdarwis dengan pengelola harus berbeda dan satu Pokdarwis itu di satu Desa yang menaungi semua desa wisata yang ada Desa itu tersebut, katakanlah Wonokerto. Wonokerto itu hanya satu Pokdarwis sekarang ini yang membawahi delapan desa wisata yang ada di Desa Wonokerto”(wawancara, 26-07-2024)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara organisasi pengelolaan Desa Wisata yang berada dalam lingkup Kalurahan Wonokerto secara langsung terkoordinasi oleh Pokdarwis Kalurahan Wonokerto. Hal ini sesuai dengan Pergub No 40 Tahun 2020 yang menekankan bahwa setiap Kalurahan hanya boleh memiliki 1 Pokdarwis demi keselarasan pembangunan di tingkat kalurahan.

Dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab pada pengelola mas Didik dalam wawancara menuturkan:

“Pada awal tahun 2012, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi syarat wajib dalam pendirian desa wisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya legitimasi berupa Surat Keputusan (SK). Seiring berjalannya waktu, tercipta hubungan yang harmonis antara Pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan dan pengelola desa wisata. Di lokasi ini, terdapat keunikan dimana anggota Pokdarwis juga merangkap sebagai pengelola.

Saya sendiri memegang posisi ganda sebagai ketua Pokdarwis dan ketua pengelola, dengan tujuan menjaga kepentingan bersama. Namun, pada tahun 2021 atau 2022, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan pemisahan antara Pokdarwis dan pengelola. Selain itu, kini hanya diperbolehkan satu Pokdarwis untuk setiap desa, yang bertugas mengawasi seluruh desa wisata di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Desa Wonokerto saat ini hanya ada satu Pokdarwis yang membawahi delapan desa wisata yang berada di wilayahnya.” (wawancara, 25-07-2024)

Pengorganisasian dalam pendekatan *collaborative governance* adalah upaya yang dilakukan dalam menciptakan sistem kelembagaan yang partisipatif yang bertujuan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif. Hal tersebut tentu berdampak pada sistem kelembagaan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan menciptakan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan program-program berbasis masyarakat. Kaitanya dengan kelembagaan Desa Wisata Pulesari berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kelembagaan tersebut telah terbentuk secara baik dengan melibatkan masyarakat dalam internal kelembagaan. Hal tersebut tentu berimplikasi pada keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat umum terciptanya hubungan baik antara lembaga pengelola dan masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa kolaborasi yang terjadi pada tahap pengorganisasian Desa Wisata Pulesari belum terjadi secara maksimal. Pemerintah kalurahan keterlibatannya sebagai pengawas dalam berjalannya organisasi, hal tersebut juga dilihat pada pengelolaan diserahkan kepada pengelola Desa Wisata Pulesari.

C. Penggerakan Desa Wisata Pulesari

Penggerakan atau pengarahannya adalah proses mendorong dan memotivasi seluruh anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada proses pelaksanaan Desa Wisata Pulesari pengelolaan sepenuhnya diberikan kepada pengelola bersama-sama dengan masyarakat yang sudah mempunyai tugas masing-masing, sesuai dengan SOP Desa Wisata Pulesari yang tertuang dalam AD/ ART desa wisata tersebut. Wawancara bersama pak Didik beliau menuturkan:

"Dalam konteks pengelolaan wisata, kami menjalin kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat. Sebagai tim manajemen, kami mengatur sistem yang memungkinkan partisipasi semua pihak dalam kegiatan pariwisata. Kami memiliki kalender kerja yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing kelompok. Di tingkat masyarakat, terdapat beberapa kelompok yang berperan aktif. Misalnya, kelompok dasawisma bertanggung jawab atas layanan katering, sementara karang taruna bertugas sebagai pemandu wisata. Ada juga kelompok PKK yang berkontribusi dalam kegiatan tertentu. Setiap kelompok ini memiliki koordinator masing-masing. Kami telah membentuk sistem yang memastikan semua kelompok dapat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata secara terorganisir. Untuk menjaga komitmen dan struktur, kami memiliki ketua dan pengurus yang mengawasi seluruh operasi." (wawancara, 26-07-2024)

Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya pengelolaan desa wisata sangat diperlukan karena Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan merupakan aspek pendukung yang sangat vital. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah kalurahan maupun pengelola dalam meningkatkan kemampuan masyarakat terkait dengan kepariwisataan yakni dengan mengadakan program pemberdayaan skala Dusun Pulesari maupun tingkat kalurahan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan juga dilihat dari keterlibatan secara teknik langsung dalam pengelolaan desa wisata seperti pada bagian pemandu wisata, penyedia rumah penginapan, penyedia catering dan layanan lainnya.

Gambar 3. 2 Rumah Penginapan yang menggunakan rumah warga



Suumber: Dokumentasi (26-07-2024

Gambar 3. 1 homestay Desa Wisata Pulesari



Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari

Dalam upaya pengembangan atraksi desa wisata atau daya tarik desa wisata, pengelola bertanggung jawab penuh dalam hal tersebut. Namun pada berjalannya Desa Wisata Pulesari terus mendapatkan support dari berbagai pihak, adapun wawancara bersama pak Didik beliau menuturkan:

“Pada proses pelaksanaan dilapangan dalam kaitannya peningkatan infrastuktur desa wisata mayoritas berasal dari anggaran kas desa wisaata. Misalnya tiap tahun kami ada dana terkait perawatan wahana bermain seperti outbond, susur sungai, maupun pembenahan pendopo-pendopo yang tersedia disini. Juga termasuk pada wisata budaya dan pertanian kami anggarkan juga dalam pembenahan alat-alat musik tradiosional dan perawatan area wisata agro seperti pemancingan dan kebun-kebun salak yang digunakan sebagai area desa wisata” (wawancara 26-07-2024)

Wawancara tersebut menunjukan pengelola bersama masyarakat bertanggung jawab penuh dalam atraksi desa wisata, seperti perawatan media

penunjang kegiatan di Desa Wisata Pulesari, yang sumber penganggarnya berasal dari kas Desa Wisata Pulesari. Dalam AD?ART pun tertulis demikian dimana 30% laba bersih Desa Wisata Pulesari dialokasikan pada pengembangan infrastruktur Desa Wisata Pulesari.

Upaya yang dilakukan pengelola dalam mengembangkan SDM Desa wisata pulesari adalah dengan mengagendakan pelatihan-pelatihan peningkatan SDM Desa wisata Pulesari.

Tabel 3. 1 Program Pelatihan peningkatan SDM Deesa Wisata Pulesari

PROGRAM	SUMBER DANA			BIAYA (Rp)	RENCANA KEGIATAN TAHUN				
	APBDes	APB N	SWADA YA		2021	2022	2023	2024	2025
<i>A. SOSIAL</i>									
1. Pelatihan Peningkatan SDM Desa Wisata	✓			Rp.2.000.000					
2. Pelatihan pengembangan potensi Desa Wisata	✓			Rp.2.000.000					
3. Pelatihan kapasitas untuk unit pengelola wisata	✓			Rp.2.000.000					
4. Study Banding	✓		✓	Rp.5.000.000					
<i>B. KELEMBAGAAN</i>									
1. Revitalisasi fungsi lembaga di dusun			✓	Rp.1.000.000					
2. Pelatihan pengembangan SDM pengelola wisata	✓		✓	Rp.2.000.000					
3. Pelatihan Pemandu Wisata	✓			Rp.1.500.000					
4. Pelatihan Management pariwisata			✓	Rp.2.000.000					

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 Tahun Desa wisata Pulesari

Tabel tersebut menunjukkan adanya upaya aktif yang dilakukan dari pengeloa desa wisata untuk menyatukan pemahaman bersama melalui program-program peningkatan SDM desa wisata yang meliputi pelatihan bagi unit pengelola, dan pelatihan bagi masyarakat yang sebagai pelaku utama dalam pengembangam desa wisata tersebut. Peningkatan sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan desa wisata berkelanjutan tentunya dengan adanya pelatihan-pelatihan peningkatan sdm dapat meningkat inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengelola desa wisata tersebut secara

berkelanjutan, tabel diatas juga menunjukkan adanya kontribusi langsung dari pemerintah kalurahan dengan menyediakan dana bagi program-program pelatihan yang direncanakan bagi Desa Wisata Pulesari. Adapun wawancara bersama pak Lurah beliau menuturkan:

’Terkait pengembangan sumber daya manusia di desa wisata, kami pemerintah kalurahan terus mengadakan pelatihan baik secara teori maupun teknis bagi pelaku-pelaku desa wisata, dalam hal ini masyarakat dan pengelola. Pelatihan tersebut direncanakan dalam program-program dari desa wisata maupun dari pemerintah desa sendiri, tentunya di desa wisata yang ada diwonokerto kami selalu mendukung melalui penganggaran APBDkal yang ada alokasinya untuk hal-hal tersebut”(wawancara 26-07-2024)

Wawancara tersebut menunjukan Pemerintah Kalurahan juga ikut terlibat dalam pengembangan sumber daya Desa Wisata, tentunya dengan keterlibatan dari pemerintah desa menunjukan adanya kolaborasi yang terjadi pada tahap ini.

Dalam pengelolaan berbasis kolaborasi poin penting yang ingin dicapai adalah pencapaian hasil bersama, yakni hasil akhir atau manfaat yang diterima dalam terjadinya kolaborasi. Adapun Desa Wisata Pulesari menjadi salah satu desa wisata dengan tingkat pengunjung terbanyak pada tahun 2023. Hasil sementara yang dirasakan masyarakat secara langsung adalah dampak finansial dari adanya pengunjung, masyarakat yang mengelola warung-warung tentunya mendapat keuntungan dari adanya pengunjung yang datang. Pun dalam wawancara bersama Pak Lurah Wonokerto beliau menuturkan:

“salah satu pencapaian dari Desa Wisata Pulesari adalah pada tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Pariwisata DIY, desa wisata Pulesari masuk sebagai salah destinasi wisata dengan kunjungan tertinggi di DIY. Kemudian secara kemanfaatan Desa Wisata Pulesari tentu juga membantu dalam menyumbang Pendapatan Asli Kalurahan dengan bagi hasil ke Kalurahan sebesar 30%. Masyarakat pun merasakan dampak finansial tersebut dengan adanya desa wisata tersebut tentunya menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat, petani dapat menjual langsung hasil pertaniannya

pada wisatawan yang sedang berkunjung di desa wisata”(wawancara,25-072024).

Wawancara tersebut menunjukan adanya manfaat yang diterima bersama dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesa, Pemerintah Kalurahan menerima manfaat melalui bagi hasil yang diterima dari pengelolaan desa wisata tersebut, masyarakat pun secara tidak langsung menerima manfaat finansial dari pengelolaan tersebut, baik sebagai petani yang menjual hasil panen langsung, masyarakat yang terlibat dalam pengadaan rumah penginapan, cattering, pengelola, mereka semua merupakan masyarakat setempat yang mengelola dan menerima manfaat dari adanya desa wisata tersebut

Salah satu hasil nyata yang terlihat setelah Desa Wisata Pulesari di kembangkan pada kurun waktu 10 tahun ini adalah adanya peningkatan fasilitas sarana jalan penghubung antar desa yang menuju ke arah desa wisata, hal ini tentu sangat bermanfaat bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Gambar 3. 3 Wisatawan Lokal



Gambar 3. 4 Wisatawan Mancanegara



Hasil sementara yang terasa dengan adanya kolaborasi ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Proses

kolaborasi ini tentu dirasakan masyarakat yang berada sekitar, dalam wawancara bersama ibu Sry sebagai masyarakat yang juga berprofesi sebagai petani dan pedagang di warung miliknya, beliau menuturkan:

“Soal dampak ke kami masyarakat terasa mas, aku di sini buka warung wedangan kecil-kecilan, kalau panen sayuran dijual juga disini, rumah ku juga dipake buat homestay untuk tamu, ya lumayan lah dengan adanya tamu yang datang tentu makin rame yang jajan makin besar juga dapetnya” (wawancara, 27-07-2024)

Hal tersebut menunjukan masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan desa wisata mendapat keuntungan secara financial pada kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, baik UMKM maupun petani yang menjual hasil pertanian mereka. Dengan terus berkembangnya Desa Wisata Pulesari tentu mendukung program Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kepentingan lainnya dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui kolaborasi yang dilakukan pada pelaksanaan Desa Wisata Pulesari belum berjalan secara maksimal. Sekali lagi hadirnya pemerintah kalurahan terlihat sebagai respon kreativitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari meskipun dari segi penerima juga ikut merasakan manfaat dari bagi hasil yang dilakukan. Dengan adanya Desa Wisata Pulesari, hal tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang masif juga berperan penting dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari secara berkelanjutan.

Keterlibatan Pemerintah Wonokerto dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wisata Pulesari pada tahap ini tidak terjadi secara maksimal yang dimana posisi Lurah disini hanya berperan sebagai pelindung dan pengawas. memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan Wonokerto, kolaborasi yang tidak seimbang ini tentunya bagi peneliti tidak menguntungkan bagi masyarakat, masyarakat disini hanya sebagai alat dalam mengelola Desa Wisata Pulesari, Pemerintah Kalurahan seharusnya lebih terlibat lagi dalam proses pelaksanaan Desa Wisata Pulesari baik dalam bentuk moral maupun moril.

Dengan menggunakan modal sosial seperti swadaya dan gotong royong masyarakat tidak bergantung pada Pemerintah Kalurahan ataupun bergantung pada pihak lain. Dengan begitu proses awal membangun hingga pelaksanaan Desa Wisata Pulesari didasarkan pada swadaya dan gotong royong masyarakat dirasa sudah mampu dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa membutuhkan hadirnya Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan Desa Wisata Pulesari.

D. Pengawasan Desa Wisata Pulesari

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling hakiki, sebaik apapun kegiatan kerja, tanpa pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan tidak dapat dikatakan berhasil. Fungsi controlling atau pemantauan desa wisata pulesari diterapkan untuk menilai efisiensi aktivitas yang sudah dijalankan. Proses pengawasan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Kaitannya dengan *collaborative governance* pengawasan merupakan tanggung jawab dari semua

pihak yang terlibat. Artinya bukan merupakan tugas dari pengelola saja tetapi pemerintah kalurahan juga harus andil dalam tahap ini. Dengan demikian, controlling menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan desa wisata pulesari berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Terkait pengawasan Desa Wisata Pulesari, pak Didik menuturkan:

“mengenai pengawasa. kami selalu terbuka soal informasi apapun baik keuangan atau lainnya, masyarakat yang hendak complain langsung saja ke sekertariat yang selalu terbuka. Selain itu kami selalu mengadakan rapat 3 bulanan dan tahunan dalam rangka membahas dan melaporkan hasil kerja pengelola agar dapat di pertanggungjawabkan”(wawancara, 25-07-2024)

Wawancara tersebut menunjukkan adanya upaya dari pengelola dalam hal keterbukaan dalam akses iformasi. Keterbukaan informasi hal ini secara langsung melibatkan masyarakat dalam memonitor perkembangan dalam pengelolaan desa wisata tersebut, secara tidak langsung dapat dengan adanya keterbukaan dalam akses informasi dapat kepercayaan antar setiap elemen yang terlibat dalam pengelolaan.

Adapun wawancara bersama ibu Sry, sebagai pengelola warung diarea Desa Wisata Pulesari, beliau menuturkan:

“Disini biasanya ada pertemuan 3 bulan sekali dan 1 tahun sekali, kalau dadakan biasa mau ada event gitu. Biasanya membahas terkait program-program, dan laporan gitu” (wawancara-29-07-2024)

Wawancara tersebut menunjukkan adanya upaya yang dilakukan dari pengelola Desa Wisata Pulesari dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, tentunya berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan desa wisata tersebut kepada masyarakat.

Keterlibatan pemerintah kalurahan dalam pengawasan Desa Wisata Pulesari belum maksimal, pemerintah desa hanya mengawasi secara formalitas administrasi, pada laporan-laporan pertanggungjawaban program maupun tahunan. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara bersama pak Lurah:

“dalam pengawasan kami Pemerintah Kalurahan mengawasi melalui adanya pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan pokdarwis, disana diundang pengelola-pengelola desa wisata yang ada di Kalurahan Wonokerto. Kemudian melalui laporan pertanggungjawaban tahunan, tentunya kamu juga berhak mengetahui perkembangan pemanfaatan sumber daya kalurahan apakah dimanfaatkan secara baik atau tidak”(wawancara, 26-07-2024)

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam tahapan pengawasan telah terlaksana namun hanya sebatas formalitas administrasi yang dilakukan, dengan pemeriksaan laporan pertanggung jawaban dari pengelola. Pemerintah Kalurahan disini hadir secara formalitas administasi dalam berorganisasi, tidak menunjukkan kehadirannya sebagai payung bagi Desa wisata Pulesari.

Berdasarkan uraian-urain hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembangunan Wisata Pulesari merupakan gagasan yang murni lahir dari masyarakat. Setelah adanya Desa Wisata ini, masyarakat mendapatkan hasil yang sangat signifikan dimulai pendapatan ekonomi yang meningkat dan juga cara mengelola Sumber Daya Alam yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan pengelolaan salak yang juga dimasukkan dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari yang secara bersama masyarakat melakukannya dengan semangat gotong royong. Keterlibatan Pemerintah Kalurahan tidak begitu signifikan pengembangan Desa Wisata Pulesari.

Sejauh ini, Kalurahan Wonokerto bersama Pokdarwis Kalurahan, meskipun mendapat hasil pemanfaatan Pemerintah Kalurahan belum hadir secara masif dalam kolaborasi yang terjadi pada pengelolaan Desa Wisata Pulesari

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik Kesimpulan berkaitan dengan “*Collaborative Governance* Pada Pengelolaan Desa Wisata “ sebagai berikut:

A. Pengelolaan Desa Wisata Pulesari:

1. Planning (Perencanaan): Inisiatif awal pembentukan desa wisata berasal dari masyarakat, didorong oleh dampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010, proses perencanaan awal di inisiasi oleh kelompok masyarakat. Pada tahapan ini kolaborasi belum terbentuk secara baik dikarenakan Pemerintah Kalurahan tidak terlibat langsung dalam proses perencanaan Desa Wisata Pulesari
2. Organizing (Pengorganisasian): Struktur organisasi dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pengelolaan berbasis masyarakat dengan koordinasi dari pemerintah desa. Kolaborasi dalam tahapan ini hanya sebatas keterlibatan Pemerintah Kalurahan dalam struktur kepengurusan sebagai pengawas. Pengorganisasian Desa Wisata Pulesari sepenuhnya diselenggarakan oleh pengelola desa wisata tersebut.
3. Actuating (Penggerakan): Penggerakan Desa Wisata Pulesari melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pengelola dan Pemerintah Kalurahan. Fokus pelaksanaan desa Wisata Pulesari adalah

Pemberdayaan SDM kepariwisataan, pengembangan atraksi dan infrastruktur. Kolaborasi yang terjadi pada pelaksanaan lagi lagi hanya kolaborasi yang bersifat semua, Pemerintah Kalurahan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengelola. Namun pemerintah tidak hadir secara langsung melibatkan diri dalam pelaksanaan Desa Wisata Pulesari, pelaksanaan Desa Wisata Pulesari, berjalan dengan adanya inisiasi dan inovasi yang dikembangkan dari masyarakat sendiri.

4. Controlling (Pengawasan): pengawasan dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari melibatkan keterbukaan informasi dari pengelola dan partisipasi masyarakat melalui pertemuan rutin, namun keterlibatan pemerintah kalurahan masih terbatas pada pengawasan formalitas administratif, menunjukkan adanya kolaborasi dalam pengawasan yang belum maksimal antara pengelola, masyarakat, dan Pemerintah Kalurahan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari harus ada sinergi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari. Masyarakat harus bisa melibatkan Pemerintah Kalurahan yang berperan sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, Pemerintah

Kalurahan pun harus ikut hadir dalam proses pengelolaan Desa Wisata Pulesari agar keseimbangan dalam kolaborasi dapat terjadi.

2. Masyarakat harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Puelsari agar menjamin kekuatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
3. Terus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan wisata.
4. Pemerintah Kalurahan Wonokerto harus memastikan distribusi manfaat ekonomi merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. J. (2021). *Collaborative Governance* Pengembangan Desa Wisata Sanankerto dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal. *JlAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2). <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Anggito, Albi. Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak. ISBN: 978-602-474-392-5
- Ansell, Chriss dan Alison Gash. (2007). Collaborative Govetnance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Administration Research and Theory*.
- Ardhia. M & Kristina, S. (2020). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Borobudur Melalui Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes).*Skripsi. FISIP*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Argyo, Demartoto. 2009. *Pembangunan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. UNS Press. Surakarta.
- Arrasyid, Muhammad Aziz. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *Journal Publicuho* 4, no. 3 (2021): 913–924.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bogdan. Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Chris Ansell and Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkley: University of Chariantoomia.
- Daerah Istimewa Yogyakarta. 2022. *Keputusan Gubernur Nomor 345 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tahun anggaran 2022
- Djulianto. (2022). *Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD', Yogyakarta.
- Endah, Kiki, "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa", *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6: 1 (Februari 2020).
- Indarto, Kus, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Wisata Warna-warni Jodipan Kota Malang Jawa Timur", *Jurnal Dialektika* (2017).

- Hariadi, Andi. (2019). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba. Skripsi. FISIP. Universitas Muhammadiyah ,Makassar.
- Herdiana, Dian. 2019. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata*. 6 (1): 63-86.
- Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Komariah, A., Satori, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Meilani, Wiwik, dkk., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wisata Kampung Flory di Kabupaten Sleman", *Jurnal Grisociabus*, vol. 1: 2 (2022).
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press*.
- Nofirma, Dkk. (2021). *Collaboratibe Governance* dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus Wisata Kebun Teh Nglinggo). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No.2*
- Rimapradesi, Yulia dan Surwandono, “Strategi Kebijakan Pariwisata Pemerintah D. I. Yogyakarta di Era New Normal”, *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 8: 1 (2022).
- Sedamaryanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

LAMPIRRAN

